



RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE TAHUN 2025 - 2029



POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE

Jln. Sungai Musi Km. 9 Waetuo, Tanete Riattang Timur, Kab. Bone
Provinsi Sulawesi Selatan 92718

www.poltekkpbone.ac.id

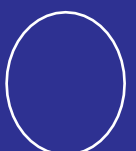
www.poltekkpbone.ac.id



Provinsi Sulawesi Selatan 92718

Jln. Sungai Musi Km. 9 Waetuo, Tanete Riattang Timur, Kab. Bone

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE**

JALAN SUNGAI MUSI KM. 9, WATAMPONE – BONE – SULAWESI SELATAN 92718
TELEPON (0481) 2920204 FAKSIMILE (0481) 2920204
LAMAR: www.poltekkpbone.ac.id SURAT ELEKTRONIK poltekkp.bone@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE

NOMOR : 78/POLTEK.BN/KEP/RSDM.430/IV/2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) POLITEKNIK KELAUTAN DAN
PERIKANAN BONE TAHUN 2025 – 2029**

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone Tahun 2025 2029 ;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan dokumen tersebut, perlu ditetapkan Tim Penyusun Renstra Tahun 2025 – 2029 melalui Surat Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone;
- Mengingat : a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 – 2029;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 91/PERMENKP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan;
- e. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 59/PMK.06/2005 Tahun 2005 Tentang Sistem Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025 – 2029 PADA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE TAHUN 2025
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone Tahun 2025 – 2029, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- Kedua : Pegawai yang diberikan tugas dan tanggungjawab dalam tim adalah sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya ;
- Ketiga : Tim bertugas untuk Menyusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan konsultasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pihak – pihak terkait dan melaporkan hasil penyusunan Renstra kepada Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Bone
Pada tanggal : 24 April 2025
Direktur Politeknik KP Bone



Dr. Muhammad Hery Riyadi Alauddin, S.Pi.M.Si.
NIP. 19740304 199903 1 002



Lampiran I : Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone
Nomor : 78/POLTEK.BN/KEP/RSDM.430/IV/2025
Tanggal : 24 April 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Renstra Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone Tahun 2025 – 2029

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
POLITEKNIK KP BONE TAHUN 2025 – 2029**

Penanggung Jawab : Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone
Ketua : Dr. Arham Rumpa, S.St.Pi, M.Si (Wakil Direktur I)
Sekretaris : Dr. Asia, S.T, M.Si (Kepala SPM)

Sub. Tim Penyusun :

- a. Kata Pengantar & Pendahuluan (Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan)
- b. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis

Koordinator : Dr. Budiyati, A.Pi.,M.Si. (Wakil Direktur II)
Anggota : Mardatillah Z, S.St.Pi
Muhammad Rasnijal, S.St.Pi.,M.Tr.Pi.
Dr. Tri Setianto, S.ST.Pi.,M.ST.Pi.
Yunarty, S.Pi.,M.Si.
Moh. Roin Najih, S.St.Pi.,M.Si.
Dr. Awaluddin, A.Pi.,M.Si
Dr. Alwi Mulato, S.St.Pi., M.ST.Pi.
Moh. Soghirun, S.Pd.M.Pd
ST. Asma, S.Si.
Eriyanti Wahid, S.Pi.,M.Si.

Sub. Tim Penyusun

- a. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kebijakan
- b. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
- c. Penutup

Koordinator : Yasser Arafat, A.Pi.,MT (Wakil Direktur III)
Anggota : Supryady, S.Pd,M.Si
Dr. Irwan, S.Pi,M.Si
Rosmaladewi, S.Pi.,M.St
Nurwahidin, S.Pi,M.Si
Ihwan, S.St.Pi,M.Si.
Muchtar Amiluddin, S.Pi.,M.Si
Siti Aisyah Saridu, S.Pi,M.Si
Rahmatang, S.Pi,M.Si
Imran, S.Pi,M.Tr.Pi
Anisa Aulia Sabilah, S.Kel, M.Si



Evaluator : Dr. Muhammad Syahrir, S.P, M.Si.
Ir. Yip Regan, M.P
Ir. Anton, S.Pd, M.P
Drs. Tamrin, M.Si
Drs. Yakub Suleman, M.Pd.

Ditetapkan di : Bone
Pada tanggal : 24 April 2025
Direktur Politeknik KP Bone



Dr. Muhammad Mery Riyadi Alauddin, S.Pi.M.Si.
NIP. 19740304 199903 1 002



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga terselesaikannya Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan internasional.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya. Keberadaan dokumen Renstra akan menjadikan panduan arah pengembangan ke depan, kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi setiap tahunnya sampai kepada pengawasan dan evaluasi kegiatan guna memperbaiki kinerja ke depan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang telah mempercayakan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peserta didik di bidang kelautan dan perikanan. Terima kasih yang luar biasa juga kami sampaikan kepada seluruh tim penyusun Renstra 2025-2029 serta Sivitas Akademika Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone.

Bone, 21 Mei 2025
Direktur,

Dr.Muhammad Hery Riyadi. A, S.Pi,M.Si
NIP. 19740304 199903 1 002



RANGKUMAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun untuk membuat dokumen dasar sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen pendidikan lainnya. Dokumen ini berusaha memaparkan seluruh aspek strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone yang menjadi dasar perencanaan kegiatan dan penganggaran.

Sistematika penyajian Rencana Strategis secara garis besar adalah :

1. Pendahuluan: memuat latar belakang, tujuan, pengertian dan ruang lingkup, konsepsi dasar dan metodologi penyusunan Rencana Strategi.
2. Profil Organisasi: memuat gambaran umum organisasi dan isu-isu strategis yang sedang dihadapi.
3. Kinerja Tahun Berjalan: menjelaskan tentang kinerja di bidang pelayanan, keuangan, administrasi, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.
4. Arah Bisnis Organisasi: berisi Nilai, Visi, Misi, Tujuan, Fungsi, Sasaran strategi pengembangan dan kerangka pembiayaan.
5. Penutup.



DAFTAR ISI

Halaman

TIM PENYUSUN RENSTRA POLITEKNIK KP BONE	
TAHUN 2025 – 2029.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
RANGKUMAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kondisi Umum	3
C. Potensi dan Permasalahan	6
D. Tujuan	9
E. Konsepsi Dasar.....	9
F. Landasan	10
G. Metode	11
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, FUNGSI DAN SASARAN STRATEGIS	12
A. Visi Misi Pemerintah Indonesia.	12
B. Visi Misi Indonesia Emas 2045.....	12
C. Visi Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan	13
D. Tujuan	15
E. Fungsi.....	15
F. Sasaran Strategis.....	17
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI	
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	22
A. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional	22
B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan	
dan Perikanan	29
C. Strategi Pengembangan Politeknik Kelautan dan	
Perikanan Bone.....	34
BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	48



A. Indikator Kinerja.....	48
B. Pendanaan	50
BAB V PENUTUP.....	51



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Poltek KP Bone Tahun 2025-2029.....	19
Tabel 2. Perkembangan Tenaga Pengajar.....	36
Tabel 3. Perkembangan Kualifikasi SDM Pengajar	37
Tabel 4. Tenaga Kependidikan Politeknik KP Bone	37
Tabel 5. Data Prasarana Politejknik KP Bone.....	38
Tabel 6. Daftar Kerja Sama Politeknik KP Bone Dengan Pihak Lain.....	39
Tabel 7. Daftar Jumlah Alumni	42
Tabel 8. Capaian Layanan Pelatihan Politeknik KP Bone	45
Tabel 9. Layanan Uji Kompetensi Politeknik KP Bone 2016-2018.....	46
Tabel 10. Akreditasi Program Studi Politeknik KP Bone.....	47
Tabel 11. Rancangan Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025-2029.....	48



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Konsepsi Dasar Penyusunan Rencana Strategis	10
Gambar 2. Peta Strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone	17



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE**

JALAN SUNGAI MUSI KM. 9, WATAMPONE – BONE – SULAWESI SELATAN 92718

TELEPON (0481) 2920204 FAKSIMILI (0481) 2920204

LAMAR: www.kkp.go.id/brsdp/poltekbone POS ELEKTRONIK: poltekkp.bone@gmail.com



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE**

JALAN SUNGAI MUSI KM. 9, WATAMPONE – BONE – SULAWESI SELATAN 92718

TELEPON (0481) 2920204 FAKSIMILE (0481) 2920204

LAMAR www.poltekkpbone.ac.id SUREL poltekkp.bone@kkp.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE
NOMOR: 89 /POLTEK.BN/RC.220/V/2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE
TAHUN 2025-2029**

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan visi dan misi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan serta mengoptimalkan perencanaan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, telah ditetapkan Peraturan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor : 177/PER-BRSDM.4/2021 tentang Rencana Strategis Pendidikan Kelautan dan Perikanan; Tahun 2025-2029;
- b. bahwa dalam rangka pengelenggaraan dan pengembangan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone lima tahun kedepan (Tahun 2025-2029);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone tentang Rencana Strategis Pendidikan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025- 2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
4. Keputusan Menristek Dikti Nomor: 185/KPT//2016 tentang Pembukaan Program Studi dalam Rangka Pendirian Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone Kelautan dan Perikanan;



5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/PERMNE-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone;
8. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Nomor:06/MEN-SJ/KP.430/III/2021 tentang Pembehentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan sebagai Direktur, Wakil Direktur serta Pembantu pada unit Pelaksana Teknis Badan Riset dan Sumber Manusia Kelautan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
9. Surat Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone Nomor : 78/POLTEK.BN/KEP/RSDM.430/IV/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE TENTANG RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone periode 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Politeknik KP Bone adalah dokumen perencanaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
2. Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone adalah satuan Pendidikan yang berada dibawah Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

1. Renstra Politeknik KP Bone yang merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan program kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan.



2. Renstra Politeknik KP Bone sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Renstra Politeknik KP Bone, meliputi:

- a. pendahuluan yang berisi latar belakang, kondisi umum, potensi, permasalahan lingkungan strategis, dan isu-isu strategis;
- b. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
- c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan, kerangka kelembagaan;
- d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
- e. penutup.

Pasal 4

Renstra Politeknik KP Bone sebagai pedoman indikator kinerja Pendidikan KP, indikator kinerja kegiatan eselon III bagi unit kerja di lingkungan Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan terdiri dari indikator kinerja program Pendidikan KP, indikator kinerja kegiatan unit pelaksanaan teknis dan unit eselon III dan IV lingkup Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bone
Pada tanggal : 21 Mei 2025
Direktur Politeknik KP Bone,



Dr. Muhammad Hery Riyad Alauddin, S.Pi., M.Si
NIP. 19740304 199903 1 002



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone (RENSTRA PKP Bone) dilakukan sebagai tindak lanjut dari penataan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut dijelaskan tugas Politeknik KP Bone yaitu menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.

Rencana Strategis (Renstra) Politeknik KP Bone 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Politeknik KP Bone, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 2029 dan dapat ditinjau ulang sesuai aturan yang berlaku.

Renstra Politeknik KP Bone Tahun 2025-2029 sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan Politeknik KP Bone merupakan turunan rencana strategis Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang juga merupakan turunan dari visi BPPSDM-KP dan KKP. Keberadaan Politeknik KP Bone memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi Pusat Pendidikan KP (Pusdik KP), Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), KKP dan Pemerintah melalui kegiatan di bidang pendidikan kelautan dan perikanan sebagai berikut :Renstra Politeknik KP Bone Tahun 2025-2029 sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan Politeknik KP Bone merupakan turunan rencana strategis Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang juga merupakan turunan dari visi BPPSDM KP dan KKP.



Keberadaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang kelautan dan perikanan untuk menyediakan tenaga profesional bidang kelautan dan perikanan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha, diselenggarakan melalui pendekatan teaching factory;
2. Melaksanakan penelitian yang inovatif terapan yang bermanfaat bagi dunia industri dan dunia usaha bidang kelautan dan perikanan;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kontribusi penerapan ilmu pengetahuan kelautan dan perikanan dalam membangun daerah dan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Menjalin hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri serta pelaku usaha perikanan untuk mewujudkan perikanan mandiri yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan manajemen dan tata kelola berdasarkan sistem penjamin mutu yang terstandaran.

Dalam kerangka pelaksanaan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029* yang diarahkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu “*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*”, sektor kelautan dan perikanan ditempatkan sebagai salah satu sektor strategis dalam Trisula Pembangunan. Sektor ini memainkan peran penting dalam mendorong penurunan kemiskinan ekstrem hingga 0%, peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dengan target Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 8%, serta akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia agar mampu bersaing secara global.

Sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, pengembangan sektor kelautan dan perikanan harus ditopang oleh ketersediaan SDM yang unggul, adaptif terhadap perubahan zaman, serta memiliki kapabilitas dalam mengelola potensi laut dan perikanan secara berkelanjutan. Dalam konteks inilah, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone hadir sebagai institusi pendidikan vokasi



yang memiliki mandat strategis untuk mencetak tenaga profesional bidang kelautan dan perikanan yang tidak hanya tangguh secara teknis, namun juga memiliki jiwa kewirausahaan serta kemampuan berinovasi.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lompatan inovasi di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 telah memunculkan tantangan baru sekaligus peluang besar bagi sektor kelautan dan perikanan. Revolusi Industri 4.0 yang ditandai oleh integrasi *cyber-physical system*, teknologi informasi, dan *artificial intelligence* telah mengubah pola kerja dan produksi, sementara era Society 5.0 mendorong manusia untuk berperan aktif dalam mengelola teknologi dan memanfaatkan data secara cerdas untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam konteks ini, SDM menjadi pusat dari transformasi dan pengambilan keputusan yang cerdas berbasis teknologi.

Transformasi tersebut menuntut lembaga pendidikan vokasi seperti PKP Bone untuk menyesuaikan diri dan mengembangkan strategi jangka panjang yang mampu menjawab tantangan masa depan. RENSTRA PKP Bone 2020–2029 disusun sebagai pedoman arah pembangunan institusi yang responsif terhadap dinamika global, kebijakan nasional, serta kebutuhan lokal dalam pengembangan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan. RENSTRA ini menjadi kerangka strategis untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan vokasi, serta memperluas jejaring kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Lebih dari itu, RENSTRA ini juga menjadi komitmen PKP Bone dalam membangun SDM kelautan dan perikanan yang berdaya saing, siap pakai, dan mampu menjadi pelaku aktif dalam pembangunan ekonomi biru (*blue economy*), penciptaan lapangan kerja baru melalui kewirausahaan, serta pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Dalam konteks inilah, Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) PKP Bone 2025–2029 menjadi sangat penting sebagai instrumen perencanaan jangka menengah untuk memperkuat posisi dan peran institusi dalam pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. RENSTRA ini disusun untuk merespons dinamika global, nasional, dan lokal, serta menjawab kebutuhan nyata dunia kerja terhadap lulusan vokasi yang profesional, produktif, dan memiliki daya saing. Dengan dukungan visi nasional dan semangat inovasi, PKP Bone



diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mencetak SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.



B. Kondisi Umum PKP Bone

Politeknik KP Bone berdiri berdasarkan gagasan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membentuk 10 Politeknik KP Bone dan dukungan Pemerintahan Kabupaten Bone. Berdiri di atas tanah seluas 10 Hektar, yang merupakan daerah pertambakan di Jalan Sungai Musi KM.9, Kelurahan Waetuo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Mulai dibangun pada tahun 2015 dengan anggaran APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta mulai beroperasi pada bulan September 2016. Sebelum terbentuknya kelembagaan yang resmi, Kepala Badan Pengembangan Sumber daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan menunjuk Tim Persiapan Politeknik KP Bone, dan Politeknik KP Kupang berdasarkan SK Nomor: 19/KEP-BPSDMPKP/2016 tentang Tim Persiapan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Politeknik KP Bone dan Kupang untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Politeknik KP Bone sampai dengan 31 Desember 2016.

Pendirian Politeknik KP Bone berdasarkan (1) Surat Rekomendasi Bupati Bone Nomor: 410/424/III/Dp tanggal, 12 Maret 2015; (2) Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 5459/E2.2/KL/2015, tanggal 14 Juli 2015 tentang Pendirian Politeknik KP Bone; (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 64/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik KP Bone dan (4) Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 185/KPT/I/2016 Tanggal 11 Mei 2016, tentang Pembukaan Program Studi dalam rangka Pendirian Politeknik KP Bone.

Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone didirikan sebagai bagian dari strategi nasional dalam rangka memperkuat sektor kelautan dan perikanan melalui penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, terampil, dan siap kerja. Pendirian lembaga ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan nyata akan tenaga vokasi yang mampu mengelola potensi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, khususnya di wilayah Indonesia Timur, yang dikenal kaya akan sumber daya pesisir namun masih menghadapi tantangan dalam pengelolaannya secara optimal.



Sebagai satu-satunya lembaga pendidikan vokasi bidang kelautan dan perikanan di kawasan Bone, Sulawesi Selatan, PKP Bone sejak awal dirancang untuk menjadi pusat pendidikan dan pelatihan vokasi yang menjembatani kebutuhan dunia usaha dan industri (DUDI) dengan pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dan nelayan. Fungsi ini tidak hanya berfokus pada penguatan aspek teknis penangkapan, budidaya, pengolahan, dan konservasi, tetapi juga menysar pembentukan karakter SDM yang adaptif, inovatif, serta memiliki jiwa kewirausahaan

Kegiatan Pendidikan Kelautan dan Perikanan secara umum bertujuan menyediakan tenaga terdidik yang kompeten dibidang kelautan dan perikanan sesuai standar kebutuhan dan prioritas nasional untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan dan program nasional. Untuk optimalnya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan Pendidikan Kelautan dan Perikanan dibagi menjadi beberapa kelompok kegiatan, meliputi :

1. Pengembangan sistem Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
2. Penyelenggaraan Pendidikan Kelautan dan Perikanan dengan pendekatan TEFA;
3. Pembinaan dan peningkatan kualitas pendidik, tenaga kependidikan, dan aparatur;
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
5. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian terapan;
6. Pengembangan sertifikasi kompetensi dan kelembagaan pendidikan kelautan dan perikanan;
7. Pelaksanaan forum pendidikan kelautan dan perikanan;
8. Pelaksanaan pembelajaran dengan melibatkan pemangku kepentingan;
9. Penguatan satuan pendidikan sebagai penjurur (*Center of Excellence*);
10. Pengembangan bidang kemaritiman dan penguatan bidang perikanan di satuan pendidikan lingkungan KKP; dan
11. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan vokasi KP

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor: 91/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan, bahwa Politeknik



KP Bone berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang menangani Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan kedudukan tersebut Politeknik KP Bone mempunyai tugas ;

1. Penyusunan rencana dan program pendidikan;
2. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi yang meliputi pengajaran dan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan;
5. Pengembangan sistem penjaminan mutu;
6. Pelaksanaan pembinaan karakter;
7. Pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
8. Pengelolaan kesejahteraan taruna, dan praktik kerja taruna serta urusan alumni;
9. Pelaksanaan pengawasan internal;
10. Pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, sarana dan prasarana lainnya; dan
11. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, tata usaha, kerumahtanggaan, evaluasi, dan pelaporan

Seiring dengan tuntutan perubahan zaman, kemajuan teknologi, dan meningkatnya kebutuhan dunia usaha dan industri (DUDI), kesiapan kelembagaan menjadi kunci dalam mewujudkan visi PKP Bone sebagai pusat pendidikan vokasi unggulan. Untuk itu, RENSTRA PKP Bone 2025–2029 disusun sebagai instrumen penguatan kelembagaan yang bertujuan memastikan tata kelola organisasi yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada mutu.

C. Potensi yang dimiliki PKP Bone

Politeknik Kelautan dan Perikanan (PKP) Bone memiliki posisi yang sangat penting dalam mendukung arah pembangunan nasional di sektor kelautan dan perikanan, khususnya dalam mewujudkan *Revolusi Biru* yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai bagian dari institusi pendidikan tinggi vokasi di bawah KKP, PKP Bone menjadi representasi dari upaya nyata pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) kelautan



dan perikanan yang unggul, berdaya saing global, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Sejak didirikan, PKP Bone telah menunjukkan potensi kelembagaan yang kuat, tidak hanya dari sisi infrastruktur dan letak geografis yang strategis di kawasan Teluk Bone, tetapi juga dari sisi mandat pendidikan yang spesifik dan terintegrasi dengan kebutuhan wilayah kerja regional seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur. Sebagai lembaga pendidikan yang memiliki Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan PUPKAPIN-I untuk sertifikasi kepelautan. PKP Bone menjadi rujukan regional bagi pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja kelautan dan perikanan, sehingga memperkuat posisi institusi ini sebagai simpul penting dalam rantai pasok SDM sektor maritim nasional.

Potensi geografis PKP Bone yang dekat dengan perairan produktif dan kawasan pertambakan membuka ruang yang luas bagi pelaksanaan pendidikan berbasis praktik seperti *Teaching Factory*, pelatihan kewirausahaan, serta riset terapan berbasis kebutuhan lapangan. Hal ini memberikan daya dukung nyata terhadap terwujudnya Visi Politeknik KP Bone, yaitu menjadi *pendidikan tinggi vokasi kelautan dan perikanan yang bermutu, profesional, dan berdaya saing internasional*.

Dalam kerangka pelaksanaan misi kelembagaan, potensi PKP Bone secara konkret terhubung dengan lima misi utama yang menjadi pilar transformasi kelembagaan ke depan:

1. Penyelenggaraan pendidikan vokasi bermutu dan profesional ditunjang oleh sistem pembelajaran berbasis TEFA, kurikulum adaptif, serta program sertifikasi kompetensi yang selaras dengan standar nasional dan internasional. Kedekatan dengan sumber daya alam pesisir menjadi modal untuk mengembangkan laboratorium alam yang kaya bagi penguatan keterampilan praktis.
2. Penelitian terapan yang inovatif dapat terus dikembangkan melalui pemanfaatan potensi lokal seperti perikanan tangkap di Teluk Bone, budidaya tambak, dan pengolahan hasil perikanan berbasis teknologi tepat guna. Hal ini mendukung orientasi PKP Bone sebagai pusat riset terapan yang menjawab persoalan riil sektor kelautan dan perikanan di kawasan timur Indonesia.



3. Pengabdian kepada masyarakat berbasis desa inovasi terintegrasi dengan program pemberdayaan masyarakat pesisir melalui transfer teknologi, pelatihan keterampilan, dan penerapan hasil riset. Kelekatan PKP Bone dengan komunitas lokal menjadikan peran ini bukan sekadar program, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial institusi terhadap pembangunan berkelanjutan.
4. Pembangunan SDM yang unggul, berkarakter, dan berjiwa entrepreneurship menjadi kekuatan utama pendidikan di PKP Bone yang tidak hanya menyiapkan lulusan siap kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru di bidang kelautan dan perikanan. Program pembinaan karakter melalui sistem ketarunaan, kegiatan wirausaha, dan budaya akademik yang kondusif menjadi fondasi untuk mencetak lulusan yang tangguh dan inovatif.
5. Tata kelola institusi yang profesional dan akuntabel didorong melalui penguatan sistem manajemen berbasis mutu, digitalisasi layanan akademik, serta pembangunan budaya kerja progresif yang selaras dengan prinsip-prinsip good governance. Dalam konteks ini, penguatan kelembagaan menjadi titik tolak keberhasilan implementasi RENSTRA PKP Bone 2025–2029.

Dengan mengintegrasikan potensi geografis, dukungan regulasi, kekuatan SDM, serta komitmen terhadap visi dan misi institusi, PKP Bone memiliki modal strategis yang sangat kuat untuk berkembang menjadi *Center of Excellence* dalam pendidikan vokasi kelautan dan perikanan. RENSTRA PKP Bone 2025–2029 disusun sebagai alat kendali arah transformasi kelembagaan yang berkelanjutan, adaptif terhadap tantangan global, dan konsisten dalam menjawab kebutuhan masyarakat maritim Indonesia secara nyata.

Sebagai lembaga pendidikan vokasi yang berada langsung di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Politeknik KP Bone memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya institusi strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul di bidang kelautan dan perikanan. Keunggulan-keunggulan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi utama, yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, yang secara sinergis memperkuat posisi dan daya saing lembaga di tingkat nasional maupun internasional.



a). Keunggulan Komparatif

Keunggulan komparatif merupakan keunikan struktural dan sistemik yang secara langsung melekat pada karakteristik Politeknik KP Bone, yang membedakannya dari institusi pendidikan tinggi lain. Beberapa aspek keunggulan komparatif tersebut antara lain:

1. Proporsi Kegiatan Praktik yang Dominan (70:30):

Sistem pembelajaran di Politeknik KP Bone mengedepankan pendekatan *learning by doing*, di mana sekitar 70% kegiatan pendidikan diarahkan pada praktik lapangan dan keterampilan teknis, sementara 30% sisanya mencakup teori dan pembelajaran kelas. Hal ini memastikan bahwa lulusan tidak hanya memahami konsep, tetapi juga terampil secara teknis dan siap terjun langsung ke dunia kerja atau usaha.

2. Pembinaan Karakter melalui Disiplin Tinggi:

Kehidupan kampus diwarnai oleh sistem pembinaan karakter yang menekankan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan integritas. Model ini membentuk lulusan yang memiliki *soft skill* unggul seperti daya juang, etos kerja tinggi, serta loyalitas terhadap tugas dan profesi.

3. Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Profesi:

Politeknik KP Bone memiliki fasilitas dan legalitas untuk menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini menjadi modal penting dalam menciptakan lulusan yang tidak hanya mengantongi ijazah akademik, tetapi juga memiliki bukti kompetensi profesional yang diakui oleh industri, baik di tingkat nasional maupun internasional.

b). Keunggulan Kompetitif

Selain keunggulan struktural, Politeknik KP Bone juga telah mengembangkan keunggulan kompetitif yang berorientasi pada kemampuan adaptasi dan ketahanan individu lulusan dalam menghadapi tantangan dunia kerja. Aspek-aspek keunggulan kompetitif ini antara lain:

1. Ketahanan Fisik dan Mental yang Unggul:

Melalui sistem pendidikan terpadu yang menggabungkan pembelajaran akademik, pembinaan fisik, dan kegiatan lapangan, taruna Politeknik KP Bone



dibentuk menjadi pribadi yang tangguh secara fisik dan mental. Kemampuan bertahan dan bekerja dalam kondisi lapangan yang keras menjadi ciri khas lulusan, terutama di sektor penangkapan ikan dan kegiatan kelautan yang menuntut daya tahan tinggi.

2. Disiplin dan Dedikasi dalam Berkarya:

Lulusan Politeknik KP Bone menunjukkan tingkat disiplin dan dedikasi yang tinggi, baik dalam sektor pemerintah, swasta, maupun wirausaha. Ini menjadi nilai tambah tersendiri yang dicari oleh industri kelautan dan perikanan yang membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya terampil tetapi juga berkomitmen dan bertanggung jawab.

3. Kepemilikan Sertifikasi Kompetensi:

Dalam upaya meningkatkan daya saing lulusan, Politeknik KP Bone membekali taruna dengan berbagai sertifikat kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) maupun Standar Internasional seperti STCW-F (Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel). Sertifikasi ini mencakup keahlian teknis, keselamatan kerja, operasi penangkapan ikan, manajemen armada, dan lain sebagainya, yang relevan dengan kebutuhan industri.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi strategis sebagai *Pendidikan Tinggi Vokasi Kelautan dan Perikanan yang berstandar Internasional pada Tahun 2030*, Politeknik Kelautan dan Perikanan (PKP) Bone terus melakukan penguatan kelembagaan secara menyeluruh. Salah satu aspek utama yang menjadi keunggulan dan potensi kelembagaan PKP Bone adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta tersedianya sumber daya manusia (SDM) profesional yang menjadi pilar dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Dari sisi sarana dan prasarana, PKP Bone telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap dan modern, serta terus diperbaharui sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi di sektor kelautan dan perikanan. Berdasarkan data tahun 2025, total nilai aset yang dimiliki mencapai lebih dari **Rp. 225 miliar (Tabel.1)**, mencakup berbagai komponen seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jembatan, jaringan irigasi, hingga aset tak berwujud. Fasilitas-fasilitas ini dirancang untuk mendukung pembelajaran berbasis praktik secara



intensif, termasuk kegiatan laboratorium, workshop teknik penangkapan ikan, pelatihan berbasis kompetensi, serta praktik lapang dan teaching factory.

Tabel 1. Aset Politeknik KP Bone Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Barang konsumsi	76,486,648
2	Suku cadang	350,000
3	Bahan baku	40,113,542
4	Persediaan lainnya	26.575.168
5	Tanah	146,864,085,000
6	Peralatan dan mesin	30,372,723,648
7	Gedung dan bangunan	87,430,910,997
8	Jalan dan jembatan	4,879,138,785
9	Irigasi	7,884,212,929
10	Jaringan	2,568,182,735
11	Aset tetap lainnya	633,598,730
12	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(28,585,586,718)
13	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(17,215,186,130)
14	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(4,077,254,884)
15	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(4,852,409,428)
16	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(644,103,814)
17	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(378,695,800)
18	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	45,000,000
19	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(24,642,849)
	J U M L A H	225,016,923,391

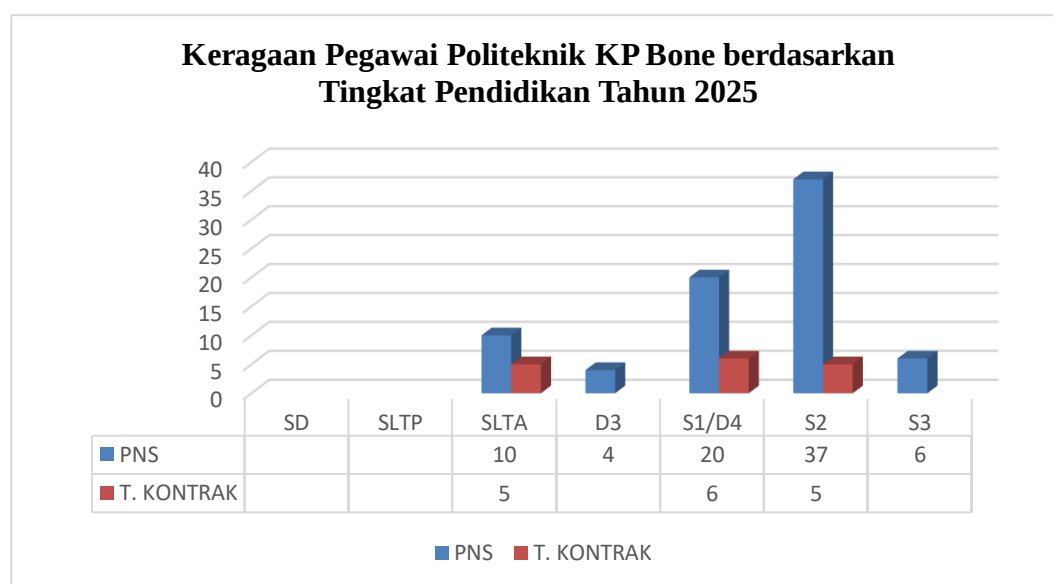
Sumber : Politeknik KP Bone (2025)

Keberadaan aset fisik tersebut menunjukkan bahwa PKP Bone memiliki kesiapan infrastruktur yang kuat untuk mengimplementasikan pendidikan vokasi yang bertumpu pada pendekatan *hands-on training* dan berbasis industri. Bahkan, setiap tahunnya, penguatan fasilitas ini dilakukan secara bertahap agar senantiasa adaptif terhadap dinamika teknologi dan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri (DUDI).

Selain dukungan fisik, keberhasilan pelaksanaan misi institusi sangat

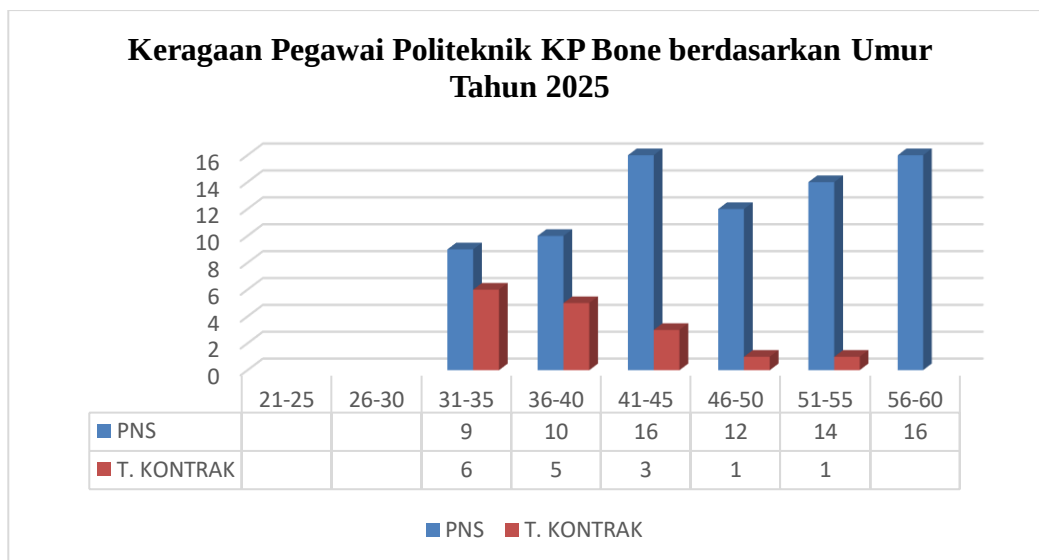


ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang tersedia. Saat ini, PKP Bone didukung oleh total 127 tenaga kerja, terdiri atas 77 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta 48 orang Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Dari sisi kompetensi akademik, mayoritas SDM berada pada jenjang pendidikan Magister (S2) sebanyak 41 orang, serta 6 orang berpendidikan Doktor (S3), yang menjadi modal penting dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi berkualitas, penelitian terapan, serta pengabdian masyarakat berbasis inovasi.



Gambar 1. Keragaan Pegawai Politeknik KP Bone Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.

Lebih lanjut, jika ditinjau dari komposisi usia, sebagian besar pegawai PKP Bone berada dalam usia produktif (31–55 tahun). Kondisi ini memperlihatkan tingkat kesiapan dan potensi akselerasi kelembagaan dalam menghadapi tantangan global dan transformasi sektor kelautan dan perikanan, baik dari sisi pengembangan kurikulum berbasis SKKNI, SNI/IKTI, dan STCW-F, maupun dalam menjawab kebutuhan industri dan masyarakat pesisir secara langsung.



Gambar 2. Keragaan Pegawai Politeknik KP Bone Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025

Ketersediaan SDM yang relatif muda, berkualifikasi tinggi, serta lingkungan kerja yang mendorong inovasi dan kolaborasi, menjadi fondasi strategis untuk mewujudkan visi institusi. Terlebih lagi, penguatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan terus diarahkan untuk mampu berperan sebagai *agent of change* dalam meningkatkan mutu lulusan, kualitas penelitian, dan kontribusi nyata terhadap pembangunan masyarakat kelautan dan perikanan secara nasional maupun internasional.

Dengan sinergi antara kesiapan sarana prasarana dan keunggulan SDM yang dimiliki, Politeknik KP Bone memiliki potensi yang besar untuk menjadi institusi pendidikan vokasi unggulan yang tidak hanya mampu mencetak lulusan kompeten, tetapi juga mendorong perubahan sosial, ekonomi, dan ekologi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

D. Permasalahan

Dalam lima tahun mendatang (2025 – 2029), arah kebijakan utama pemerintah adalah pemberdayaan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Lebih spesifik, RPJMN 2025-2029 bertujuan untuk mencapai target "Indonesia Emas 2045" dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi yang merata, dan pembangunan yang berkelanjutan.



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir Indonesia lebih besar dibandingkan dengan wilayah non-pesisir. Wilayah pesisir memiliki 17,74 juta orang miskin, yang menyumbang 68% dari total kemiskinan di Indonesia. Kondisi ini menggambarkan tentang kondisi sebagian pelaku usaha perikanan Indonesia yang masih tergolong miskin merupakan persoalan kompleks dan bersifat multi dimensional sehingga membutuhkan pendekatan komprehensif untuk menyelesaikannya.

Selain masalah tersebut di atas, isu nasional terkait illegal fishing, kerusakan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya perikanan yang tidak berkelanjutan akan menjadi tantangan yang sangat luar biasa. Dalam menyikapi dan mencari solusi penanggulangannya, maka Politeknik KP Bone mengambil peran melalui kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, dan keterlibatan secara langsung pada kegiatan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) untuk membantu mengurai permasalahan isu nasional tersebut guna meningkatkan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan itu sendiri.

Lebih spesifik lagi permasalahan pada sektor SDM perikanan terkait dengan ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai dalam dunia usaha dan dunia industri, sebagai bentuk kesiapan penyelenggaraan pendidikan di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mencetak SDM yang siap pakai dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Politeknik KP Bone memiliki peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul, adaptif, dan kompeten di bidang kelautan dan perikanan. Namun, dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dan peran kelembagaan yang lebih strategis, masih terdapat sejumlah tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi secara sistematis dan berkelanjutan. Adapun isu-isu strategis tersebut meliputi aspek penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, penjaminan mutu, pengawasan internal, pembinaan karakter taruna, pembinaan sivitas akademika, serta pengelolaan fasilitas penunjang akademik.

1. Penyelenggaraan Pendidikan

Salah satu tantangan mendasar adalah keterbatasan sarana dan prasarana



pembelajaran yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Hal ini berdampak pada efektivitas proses belajar mengajar, khususnya dalam konteks pendidikan vokasi yang menekankan pada keterampilan praktis dan penguasaan teknologi. Kebutuhan akan laboratorium tematik, peralatan penangkapan ikan, simulator, dan fasilitas praktik lainnya masih harus ditingkatkan agar dapat mendukung pembelajaran berbasis kompetensi secara optimal.

2. Penyelenggaraan Penelitian

Dalam bidang penelitian, terdapat beberapa kendala yang signifikan, seperti masih rendahnya kapasitas dosen dalam mempublikasikan hasil riset pada jurnal ilmiah bereputasi nasional maupun internasional. Selain itu, dukungan dana riset yang tersedia masih belum mencukupi untuk mengakomodasi seluruh proposal penelitian yang diajukan dosen. Di sisi lain, kolaborasi riset antarlembaga, baik di dalam maupun luar negeri, masih belum berjalan optimal, sehingga membatasi ruang inovasi dan pertukaran pengetahuan antarpeneliti.

3. Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, tantangan utama terletak pada belum maksimalnya penerapan hasil-hasil penelitian terapan dalam bentuk teknologi tepat guna yang bisa diadopsi oleh masyarakat pelaku utama perikanan. Selain itu, publikasi ilmiah hasil kegiatan pengabdian juga masih terbatas, yang mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas dosen dalam menyusun laporan pengabdian yang terstandar dan layak terbit di media ilmiah.

4. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Penerapan sistem penjaminan mutu internal yang seharusnya menjadi pondasi budaya mutu di perguruan tinggi, masih belum terlembagakan secara konsisten. Proses audit mutu internal, monitoring, dan evaluasi terhadap kinerja tridarma serta manajemen institusi belum dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan.

5. Sistem Pengawasan Internal

Pada aspek pengawasan internal, Politeknik KP Bone masih menghadapi hambatan terkait belum tersedianya auditor internal secara formal. Akibatnya, pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap efektivitas dan efisiensi operasional institusi masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip tata



kelola yang baik (*good governance*).

6. Pembinaan Karakter dan Kreativitas Taruna

Pembinaan karakter taruna yang merupakan ciri khas pendidikan di lingkungan politeknik kelautan dan perikanan masih menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan fasilitas pembinaan karakter seperti asrama, ruang pembinaan, serta arena pengembangan kreativitas. Selain itu, pembina asrama dan pembina konseling masih memerlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan atau *Training of Trainers (ToT)* agar dapat menjalankan peran mereka secara profesional. Di sisi lain, proses seleksi taruna yang diterima belum seluruhnya mencerminkan standar input yang ideal, baik dari sisi kesiapan fisik, mental, maupun akademik.

7. Pengelolaan Kampus dan Relasi Lingkungan

Lingkungan kampus sebagai ruang pembelajaran dan pengembangan karakter juga menghadapi beberapa isu. Penataan ruang dan infrastruktur kampus belum sepenuhnya memperhatikan prinsip estetika, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Sarana sanitasi dan kebersihan pun masih memerlukan perhatian lebih agar sesuai dengan standar kenyamanan dan kesehatan sivitas akademika.

8. Pengelolaan Fasilitas Pendukung Akademik

Fasilitas pendukung pembelajaran seperti perpustakaan, laboratorium, instalasi lapangan, dan unit-unit pelatihan belum dikelola secara optimal. Kekurangan tenaga administrasi dan teknis, minimnya koleksi referensi mutakhir di perpustakaan, serta belum tersedianya peralatan pembelajaran praktis yang memadai di setiap unit menjadi faktor pembatas dalam mendukung proses pembelajaran yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan iptek dan kebutuhan industri.

Permasalahan yang secara khusus terjadi Politeknik KP Bone yang perlu segera dilakukan pembenahan adalah :

Politeknik Kelautan dan Perikanan (KP) Bone sebagai institusi pendidikan vokasi yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan, saat ini menghadapi beberapa permasalahan krusial yang perlu segera ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Permasalahan-permasalahan tersebut mencerminkan tantangan internal yang dapat memengaruhi efektivitas peran Politeknik KP Bone dalam



menghasilkan lulusan yang kompeten, serta menurunkan daya saing institusi di tingkat nasional maupun internasional.

Pertama, sumber daya manusia kelautan dan perikanan (SDM KP) yang merupakan alumni Politeknik KP Bone secara umum belum menjadi pilihan utama atau prioritas bagi para pengguna tenaga kerja di sektor industri maupun instansi pemerintahan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara profil lulusan dengan kebutuhan riil di dunia kerja, yang kemungkinan disebabkan oleh kurang optimalnya penyesuaian kurikulum, kurangnya pengalaman praktis yang sesuai dengan standar industri, atau kurangnya branding lulusan di mata pemangku kepentingan.

Kedua, dari segi dukungan sarana dan prasarana pendidikan, kondisi peralatan dan fasilitas belajar yang dimiliki Politeknik KP Bone saat ini masih memerlukan peningkatan dan modernisasi. Teknologi yang digunakan sebagian besar belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi terkini yang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian (upgrade) terhadap peralatan laboratorium, teknologi pembelajaran, dan infrastruktur pelatihan agar dapat mendukung pelaksanaan kurikulum yang berbasis industri serta menghasilkan lulusan yang lebih siap pakai.

Ketiga, dalam aspek tata kelola institusi, Politeknik KP Bone masih perlu melakukan reformasi internal agar sistem pengelolaan kampus dapat mengacu secara lebih utuh pada prinsip-prinsip tata kelola perguruan tinggi yang mengacu pada standar internasional. Penguatan aspek manajemen mutu, transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan akademik berbasis digital perlu dikembangkan secara konsisten agar tercipta tata kelola yang adaptif dan responsif terhadap perubahan global.

Keempat, jaringan kerja sama atau kemitraan yang dikembangkan oleh institusi masih terbatas baik secara geografis maupun sektoral. Padahal, keberadaan jejaring dengan dunia usaha, dunia industri, pemerintah daerah, serta lembaga internasional sangat penting untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, magang industri, serta penyerapan lulusan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan ekspansi dan penguatan kemitraan strategis yang bersifat multisektor dan multinasional.

Kelima, peran Politeknik KP Bone dalam pengembangan teknologi terapan



dan pemberdayaan masyarakat di sektor kelautan dan perikanan masih tergolong minim. Padahal, sebagai institusi vokasi, Politeknik KP memiliki potensi besar untuk menjadi pusat inovasi lokal, terutama dalam pengembangan teknologi tepat guna dan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat pesisir dan nelayan. Keterlibatan aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan transfer teknologi menjadi salah satu indikator penting keberhasilan institusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan nasional.

Melalui pemetaan berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi Politeknik Kelautan dan Perikanan (PKP) Bone sebagaimana telah dijabarkan secara sistematis pada aspek penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, penjaminan mutu, pengawasan internal, pembinaan karakter taruna, pengelolaan lingkungan kampus, hingga sarana pendukung akademik, tampak jelas bahwa institusi ini tengah berada dalam posisi strategis untuk melakukan penguatan kapasitas kelembagaan secara menyeluruh.

Berbagai keterbatasan seperti belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran, rendahnya produktivitas riset dan publikasi dosen, serta lemahnya sistem penjaminan mutu dan pengawasan internal, menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara idealisme penyelenggaraan pendidikan vokasi kelautan-perikanan dengan realitas implementatif di lapangan. Selain itu, pembinaan karakter taruna dan penataan lingkungan kampus yang belum maksimal, juga mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam pembangunan lingkungan belajar yang mendukung kualitas lulusan berdaya saing tinggi.

Dari sisi pengelolaan fasilitas dan SDM, kebutuhan terhadap peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga administrasi, ketersediaan bahan ajar dan referensi, serta kelengkapan laboratorium dan instalasi pembelajaran juga menjadi faktor kunci yang harus segera diintervensi. Ketidakterpenuhan pada aspek-aspek ini tidak hanya berimplikasi pada kualitas output pendidikan, tetapi juga berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan uraian ini adalah bahwa PKP Bone membutuhkan strategi transformasi kelembagaan yang terpadu, dengan dukungan kebijakan afirmatif dari kementerian terkait, penguatan sinergi antar pemangku kepentingan, serta komitmen internal untuk membangun



budaya mutu. Transformasi ini harus mencakup pembenahan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, sistem penjaminan mutu yang terlembaga, serta penguatan jejaring kolaboratif baik di tingkat nasional maupun internasional.

Upaya tersebut selaras dengan arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yaitu mencetak SDM unggul, profesional, dan berkarakter dalam menghadapi tantangan global dan dinamika industri maritim ke depan. Politeknik KP Bone, dalam konteks ini, memiliki potensi dan posisi strategis untuk berkontribusi lebih besar, asalkan seluruh tantangan yang telah diidentifikasi dapat ditangani secara terstruktur dan berkelanjutan

Secara keseluruhan, berbagai permasalahan ini menuntut langkah-langkah strategis dan komprehensif dari manajemen Politeknik KP Bone dalam melakukan pembenahan. Langkah tersebut mencakup penyesuaian kurikulum berbasis kebutuhan industri, peningkatan sarana dan prasarana, penguatan tata kelola, pengembangan jaringan kemitraan, serta perluasan peran dalam pengembangan teknologi dan pemberdayaan masyarakat. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka Politeknik KP Bone berpeluang besar menjadi institusi pendidikan vokasi yang unggul, adaptif, dan relevan dengan tantangan masa depan.

E. Lingkungan Strategis

Sebagai institusi pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang berada langsung di kawasan pesisir Teluk Bone, Politeknik Kelautan dan Perikanan (PKP) Bone memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda pembangunan kelautan dan perikanan nasional. Lingkungan tempat berdirinya kampus tidak hanya menyimpan kekayaan sumber daya hayati laut yang tinggi, tetapi juga merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat pesisir yang sangat potensial untuk pengembangan SDM berbasis maritim. Dalam konteks ini, *modal lingkungan* menjadi salah satu elemen krusial bagi keberhasilan penyelenggaraan misi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di PKP Bone.

E.1. Lingkungan Internal: Kekuatan dan Kelemahan (Strengths and Weaknesses)

E.1.1. Kekuatan (Strengths):

- 1) Letak geografis strategis di kawasan pesisir Teluk Bone yang kaya akan potensi sumber daya ikan, menjadi laboratorium alam ideal untuk praktik



- 2) Model pendidikan vokasi yang menekankan pada porsi praktik 70% dan teori 30% memberikan daya saing tinggi bagi lulusan.
- 3) Penerapan budaya disiplin dan karakter, serta sistem asrama terpadu yang mendukung pembinaan mental dan fisik taruna.
- 4) Kapasitas kelembagaan dalam menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi profesi bidang kelautan dan perikanan.
- 5) Dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai lembaga induk memberi penguatan regulatif dan arah pembangunan sektoral yang terfokus.

E.1.2. Kelemahan (Weaknesses):

- 1) Keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran yang belum memenuhi standar pendidikan tinggi nasional (SNPT).
- 2) Kapasitas dosen dalam publikasi ilmiah dan kolaborasi penelitian masih rendah, serta terbatasnya anggaran penelitian.
- 3) Minimnya penerapan hasil penelitian terapan untuk masyarakat pesisir, serta belum optimalnya publikasi ilmiah pengabdian masyarakat.
- 4) Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) belum melembaga secara sistematis dan berkelanjutan.
- 5) Belum tersedia auditor internal dan pelaksanaan pengawasan belum efektif.
- 6) Keterbatasan sarana pembinaan karakter taruna, SDM pembina yang belum memiliki pelatihan TOT, serta input taruna belum sesuai standar.
- 7) Kualitas lingkungan kampus, sanitasi, perpustakaan, laboratorium, dan instalasi pembelajaran masih perlu ditingkatkan untuk mendukung proses belajar yang lebih baik.

E.2. Lingkungan Eksternal: Peluang dan Ancaman (Opportunities and Threats)

E.2.1. Peluang (Opportunities):

- 1) Komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menjadikan Sulawesi Selatan sebagai prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
- 2) Potensi lestari sumber daya perikanan di Teluk Bone dan sekitarnya yang belum tergarap maksimal memberikan ruang luas bagi penguatan pendidikan berbasis praktik lapangan.
- 3) Kebutuhan pasar kerja nasional dan internasional terhadap tenaga kerja terampil di bidang perikanan dan industri pengolahan hasil laut yang terus meningkat.



- 4) Kecenderungan global terhadap keberlanjutan (sustainability) mendorong kebutuhan akan SDM profesional di bidang konservasi, manajemen sumber daya, dan teknologi perikanan ramah lingkungan.
- 5) Kebijakan nasional yang mendorong peningkatan kualitas SDM vokasi melalui dukungan sertifikasi, program magang industri, dan penguatan link and match.

E.2.2. Ancaman (Threats):

- 1) Struktur usaha penangkapan ikan yang masih didominasi skala kecil, berisiko mempersempit ruang pelatihan industri nyata bagi taruna.
- 2) Kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang masih rendah, memengaruhi partisipasi dan keterjangkauan pendidikan tinggi.
- 3) Keterbatasan jejaring internasional, menyebabkan kurangnya eksposur global bagi taruna dan dosen.
- 4) Persaingan antar lembaga pendidikan vokasi yang semakin ketat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terutama dalam konteks digitalisasi dan globalisasi kurikulum

E.3. Kaitan dengan Modal Lingkungan Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Sejalan dengan mandat Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing, PKP Bone dituntut mampu mengelola lingkungan strategis secara adaptif. Lingkungan internal kampus sebagai kekuatan harus diperkuat melalui peningkatan kelembagaan, kualitas SDM, infrastruktur, dan sistem manajemen. Sementara lingkungan eksternal seperti kebijakan nasional, kondisi ekonomi, sosial budaya, dan teknologi harus dikelola sebagai peluang pengembangan.

Dalam konteks makro, pembangunan kelautan dan perikanan nasional juga sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, konstelasi kebijakan daerah (UU No. 23/2014), perkembangan teknologi informasi, sistem pengawasan sumber daya laut, hingga sistem pengelolaan mutu produk. Seluruh faktor ini harus dipahami secara menyeluruh oleh PKP Bone untuk merumuskan arah strategis pendidikan vokasi yang relevan dan responsif.

F. Isu-isu dan Arah Strategis

Sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi di bawah naungan Kementerian



Kelautan dan Perikanan (KKP), Politeknik KP Bone memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung pencapaian visi pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Letaknya yang berada di wilayah pesisir dan dekat dengan pusat aktivitas perikanan di Teluk Bone memberikan peluang besar bagi PKP Bone untuk menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia (SDM), inovasi teknologi tepat guna, serta penguatan tata kelola sektor kelautan dan perikanan.

Namun demikian, tantangan dan dinamika lingkungan strategis saat ini maupun masa depan mengharuskan PKP Bone untuk bertransformasi secara kelembagaan, akademik, dan sosial. Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, serta evaluasi mendalam terhadap kondisi aktual kelembagaan, berikut ini dirumuskan tujuh isu strategis utama yang harus dijadikan fokus dalam perencanaan pembangunan kelembagaan ke depan;

1. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pendidikan

Isu Strategis:

- a. Kesiapan kelembagaan masih belum sepenuhnya mampu memenuhi tuntutan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana, termasuk laboratorium, perpustakaan, dan sistem informasi akademik, masih belum ideal dan Implementasi sistem penjaminan mutu internal belum berjalan secara menyeluruh dan belum menjadi budaya institusional.

Arah Strategis:

- a. Dilakukan reformulasi tata kelola kelembagaan berbasis sistem penjaminan mutu internal yang akuntabel, adaptif, dan transparan.
- b. Perlu peningkatan dan modernisasi infrastruktur akademik, termasuk digitalisasi manajemen kampus yang mendukung efisiensi layanan dan SDM pengelola lembaga ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan manajerial, kepemimpinan akademik, dan penguasaan sistem digital.

2. Peningkatan Kualitas dan Relevansi Pendidikan Vokasi

Isu Strategis:

- a. Pembelajaran masih didominasi pendekatan teoritis dan belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan industri (*demand-driven*).
- b. Dosen dan instruktur perlu penguatan kapasitas melalui sertifikasi, pelatihan



teknis, dan pendidikan lanjut dan Akses taruna terhadap uji kompetensi dan sertifikasi profesi masih terbatas karena minimnya sarana dan dukungan pendanaan.

Arah Strategis:

- a. Revitalisasi kurikulum berbasis KKNI, dengan integrasi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) serta sertifikasi profesi.
- b. Dibangun sistem pelatihan berkelanjutan bagi dosen dan instruktur, termasuk program magang industri dan kolaborasi pengajaran dan Diperluas akses terhadap lembaga sertifikasi profesi, termasuk penguatan LSP internal dan kemitraan eksternal.

3. Penguatan Tridharma Perguruan Tinggi

Isu Strategis:

- a. Kualitas dan kuantitas penelitian masih rendah, termasuk dalam hal publikasi pada jurnal ilmiah bereputasi.
- b. Program pengabdian kepada masyarakat belum sepenuhnya didasarkan pada hasil riset terapan atau kebutuhan local dan Kolaborasi antar lembaga riset, baik nasional maupun internasional, belum optimal dimanfaatkan.

Arah Strategis:

- a. Dibangun ekosistem riset terapan dengan insentif publikasi dan skema pendanaan internal.
- b. Ditingkatkan relevansi kegiatan pengabdian masyarakat berbasis teknologi tepat guna dan hasil riset local dan Diperkuat jejaring dan kolaborasi penelitian, baik dengan institusi akademik, lembaga riset, maupun pelaku industri.

4. Pembinaan Karakter dan Life Skill Taruna

Isu Strategis:

- a. Sarana pembinaan karakter dan kreativitas taruna belum sepenuhnya mendukung program pendidikan karakter yang terstruktur.
- b. Ketersediaan tenaga pembina, konselor, dan pengasuh asrama masih perlu ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan (ToT).
- c. Proses seleksi taruna belum sepenuhnya mencerminkan standar mutu dan potensi daerah pesisir.

Arah Strategis:



- a. Dibangun sistem pembinaan karakter yang menekankan nilai disiplin, integritas, tanggung jawab, serta kemampuan kerja tim.
- b. Dilaksanakan pelatihan reguler bagi pembina taruna, termasuk penguatan fungsi konseling dan pengembangan soft skills.
- c. Sistem rekrutmen taruna diperkuat berbasis merit, tes potensi, dan keterwakilan daerah pesisir.

5. Penguatan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas

Isu Strategis:

- a. Belum terbentuknya unit pengawasan internal yang independen, terlatih, dan memiliki otoritas dalam melakukan audit internal.
- b. Pelaksanaan pengawasan belum berbasis manajemen risiko, sehingga belum efektif dalam mencegah penyimpangan administratif.

Arah Strategis:

- a. Dibentuk unit pengawasan internal dengan personel bersertifikat dan tersertifikasi.
- b. Diterapkan sistem audit internal berbasis risiko dan teknologi informasi, untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pengelolaan.

6. Peran Aktif dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan Wilayah

Isu Strategis:

- a. Keterlibatan PKP Bone dalam pembangunan wilayah perikanan Teluk Bone masih belum optimal.
- b. Potensi wilayah perikanan belum dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan teknologi, kapasitas SDM, dan inovasi.

Arah Strategis:

- a. PKP Bone difungsikan sebagai *center of excellence* dalam pengembangan SDM, inovasi teknologi tepat guna, dan pelatihan masyarakat pesisir.
- b. Dikembangkan pusat inkubasi bisnis perikanan serta laboratorium teknologi aplikasi bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.

7. Adaptasi terhadap Perubahan Lingkungan Strategis

Isu Strategis:

- a. Perubahan lingkungan global dan lokal menuntut kampus memiliki fleksibilitas tinggi dalam merespon tantangan baru.
- b. Layanan pendidikan harus terus disesuaikan dengan perkembangan



teknologi, kebutuhan masyarakat, dan arah kebijakan nasional.

Arah Strategis:

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan untuk menghadapi disrupsi global melalui integrasi teknologi, digitalisasi layanan, dan peningkatan daya saing lulusan.
- b. Kolaborasi multipihak diperluas untuk membangun kampus sebagai simpul inovasi, edukasi, dan advokasi pembangunan pesisir berkelanjutan.

Politeknik Kelautan dan Perikanan (PKP) Bone memiliki posisi yang sangat strategis sebagai salah satu institusi pendidikan vokasi yang berperan penting dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan, khususnya di kawasan timur Indonesia. Wilayah ini dikenal memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah, mulai dari perikanan tangkap, budidaya pesisir, hingga potensi ekowisata bahari dan jasa kelautan lainnya. Letak geografis PKP Bone yang berada di Sulawesi Selatan menjadikannya sangat dekat dengan pusat-pusat produksi perikanan dan sentra pertumbuhan ekonomi pesisir, yang secara langsung maupun tidak langsung memberi peluang besar dalam hal pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sektor kelautan dan perikanan.

Namun demikian, seiring dengan meningkatnya tuntutan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi nasional, PKP Bone juga menghadapi sejumlah tantangan internal yang perlu segera direspons secara sistematis. Beberapa persoalan yang menonjol antara lain adalah belum optimalnya kapasitas kelembagaan, baik dalam hal struktur organisasi, sistem tata kelola, maupun penguatan manajerial. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, baik untuk kegiatan pembelajaran, praktik lapangan, laboratorium, maupun asrama dan fasilitas kampus lainnya, masih menjadi hambatan dalam pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan.

Di sisi lain, rendahnya kapasitas penelitian terapan dan publikasi ilmiah menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan keilmuan dan inovasi teknologi yang berbasis pada kebutuhan lokal masyarakat pesisir. Hal ini diperparah oleh belum melembaganya sistem penjaminan mutu internal yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam menjaga kualitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan vokasi.



Di tengah tantangan tersebut, terbuka peluang besar yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Secara nasional, pemerintah tengah mendorong penguatan pendidikan vokasi melalui berbagai kebijakan, baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), maupun dari program pembangunan SDM unggul secara lintas sektor. Kebutuhan akan SDM kelautan dan perikanan yang terampil dan siap kerja terus meningkat, terutama dalam mendukung hilirisasi perikanan, budidaya modern, digitalisasi pelabuhan, industri pengolahan hasil laut, hingga pengelolaan kawasan konservasi.

Selain itu, berbagai program prioritas nasional KKP seperti revitalisasi satuan pendidikan, program kampus biru, dan industrialisasi sektor kelautan memberikan ruang yang luas bagi PKP Bone untuk memperkuat kapasitas dan peran strategisnya. Dukungan dari mitra strategis, baik pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta lembaga internasional juga membuka peluang kerja sama dalam hal peningkatan mutu, sertifikasi, magang, serta transfer teknologi.

Dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal tersebut, maka diperlukan perumusan arah strategis kelembagaan yang lebih terfokus, terintegrasi, dan visioner. Diperlukan formulasi visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang bukan hanya menjawab tantangan saat ini, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi dinamika masa depan sektor kelautan dan perikanan. Dalam kerangka ini, pembangunan kelembagaan PKP Bone harus diarahkan pada penguatan sistem pendidikan vokasi yang adaptif, berbasis kompetensi, kolaboratif, dan relevan dengan kebutuhan kawasan pesisir dan ekonomi biru (blue economy).

Dengan demikian, PKP Bone tidak hanya menjadi pusat pendidikan vokasi yang menghasilkan lulusan terampil dan siap kerja, tetapi juga menjadi katalisator pembangunan berbasis sumber daya kelautan secara berkelanjutan, unggul dalam inovasi, dan memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir serta ketahanan ekonomi maritim nasional.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, FUNGSI DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi Misi Pemerintah Indonesia.

Visi Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode Tahun 2024 - 2029 adalah :

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan 8 (delapan) Misi yang disebut Asta Cita sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

B. Visi Misi Indonesia Emas 2045

Visi bernegara Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Penentuan



Visi ini berlandaskan pada: (i) Kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; (ii) Perkembangan megatrend global; (iii) Pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Berangkat dari visi yang ada, maka untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) Misi Pembangunan, yang terdiri atas :

1. Transformasi Sosial;
2. Transformasi Ekonomi;
3. Transformasi Tata Kelola;
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
7. Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
8. Kestinambungan Pembangunan.

C. Visi Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bagian dari kabinet kerja akan berkontribusi dan berkomitmen untuk mewujudkan visi, misi, dan agenda pembangunan nasional, dan menjalankan program kementerian.

C.1. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai bagian dari Lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mendukung terwujudnya Visi - Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu **Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**.

C.2. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Misi KKP merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas,



fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan dijabarkan dari misi pembangunan nasional. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Sesuai Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Guna mewujudkan peran KKP dalam pembangunan nasional sebagaimana diuraikan diatas, maka diperlukan Sumber Daya manusia di bidang kelautan dan perikanan (SDM-KP) yang kompeten, mempunyai karakter kuat serta kompetensi sesuai kebutuhan. Dalam grand strategy pembangunan KKP dalam RPJMN IV Tahun 2025 – 2029 disebutkan “Penguatan SDM Kompeten secara terintegrasi” disamping kebijakan lainnya. Dalam kaitan ini, Politeknik KP Bone mempunyai peran strategis dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia kelautan dan perikanan melalui kegiatan pendidikan bidang kelautan dan perikanan. Agar program pengembangan Sumber Daya manusia kelautan dan perikanan dapat berjalan sesuai dengan tahapan yang diinginkan, maka diperlukan sebuah strategi dan perencanaan yang baik dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Strategis Politeknik KP Bone.

C.3. Visi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone

Visi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Tahun 2040. Sebagai bagian dari UPT Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan yang membidangi pendidikan, maka Visi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone menyesuaikan dengan Visi Pusat Pendidikan KP, Visi BPPSDM KP, dan Visi KKP. Visi Politeknik KP Bone adalah :



“Menjadi Pendidikan Tinggi Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Berstandar Nasional dan Internasional pada Tahun 2035”.

C.4. Misi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone

Misi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone dan sebagai turunan dari penjabaran misi KKP. Misi Politeknik KP Bone:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang bermutu, professional dan berstandar internasional di bidang Kelautan dan Perikanan;
2. Menyelenggarakan penelitian terapan di bidang kelautan dan perikanan yang inovatif dalam menjawab tantangan global;
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat berbasis desa inovasi melalui pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan;
4. Membangun sumberdaya manusia unggul, berkarakter, berjiwa *entrepreneurship* melalui sistem pendidikan berbasis *character building* yang kondusif, kreatif dan inovatif;
5. Menyelenggarakan tata kelola institusi yang professional, akuntabel dan progresif secara berkelanjutan

C.4.1. Tujuan

Tujuan yang diharapkan adalah penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Politeknik KP Bone dalam rangka mencapai sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan 2025 – 2029. Tujuan Politeknik KP Bone tersebut telah tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone yaitu :

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki semangat terus berkembang, berdaya saing tinggi, bermoral, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan lingkungan serta



- unggul di bidang industri kelautan dan perikanan dengan pendekatan teaching factory;
2. Melaksanakan penelitian terapan dan menyebarluaskan hasil- hasilnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kelautan dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan mutu kehidupan;
 4. Membangun jiwa kewirausahaan di kalangan civitas akademika yang menumbuh kembangkan sektor industri bidang kelautan dan perikanan;
 5. Mengembangkan program kemitraan dan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, masyarakat, pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri.

C.4.1. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana kegiatan. Dengan demikian, tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Adapun sasaran strategis yang akan dicapai Politeknik KP Bone pada tahun 2025-2029 mengacu pada sasaran strategis Pusat Pendidikan KP adalah sebagai berikut :

1. SS1 Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat melalui kegiatan pendidikan KP;
2. SS2 Tata kelola Pemerintahan yang baik pada Politeknik KP Bone. Menjabarkan misi Sasaran Strategis Pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah "Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat melalui kegiatan pendidikan KP" dengan Indikator kinerja :



1. Peserta Didik pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik KP Bone yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja 254 orang pada tahun 2025, pada tahun 2029 menjadi 145 orang;
2. Jumlah lulusan Politeknik KP Bone 296 Orang pada Tahun 2025, Pada tahun 2029 menjadi 170 orang;
3. Peserta Pendidikan Vokasi kelautan dan perikanan Politeknik KP Bone yang Kompeten 728 orang pada tahun 2025 pada tahun 2029 menjadi 525 Orang ;
4. Nilai PNBP satker Politeknik KP Bone 0,385 Miliar pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029
5. Kerjasama Politeknik KP Bone yang disepakati 2 Kesepakatan pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029
6. Persentase lulusan Politeknik KP Bone yang bersertifikasi kompetensi tahun 2025 100 % samapai dengan tahun 2029 ;
7. Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik KP Bone 100 % tahun 2025 sampai dengan tahun 2029
8. Kajian pendidikan tinggi Kelautan dan Perikanan Politeknik KP Bone 3 Paket tahun 2025, pada Tahun 2029 menjadi 4 paket
9. Pengabdian Pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Bone 1 kelompok Tahun 2025 pada Tahun 2029 menjadi 3 Kelompok;
10. Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik KP Bone 1 Lembaga pada tahun2025 sampai tahun 2029;
11. Tenaga pendidik kelautan dan perikanan Politeknik KP Bone yang tersertifikasi 35 orang pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* Politeknik KP Bone melalui Sasaran Strategis kedua (SS-2) “Tata kelola Pemerintahan yang baik pada Politeknik KP Bone” dengan indikator kinerja” :

1. Peralatan dan Mesin serta Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Politeknik KP Bone 2 Unit pada Tahun 2026 sampai tahun 2029;
2. Prasarana Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Politeknik KP Bone 1 Unit pada tahun 2026 sampai dengan



tahun 2029;

3. Unit Kerja Politeknik KP Bone yang di bangun berpredikat WBK/WBB 1 unit kerja pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Bone 85 % pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
5. Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Bone Nilai 81 pada tahun 2025, menjadi 85 pada tahun 2029;
6. Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Bone 84 Indeks pada tahun 2025, menjadi 88 indeks pada tahun tahun 2029;
7. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang di umumkan pada SIRUP Politeknik KP Bone 80 % tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
8. Tingkat kepatuhan Pengelolaan MBN Politeknik KP Bone 80 % pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
9. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Politeknik KP Bone nilai 92 pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029
10. Nilai kinerja perencanaan Anggaran Politeknik KP Bone nilai 71.5 pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029
11. Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis Lingkup Politeknik KP Bone 100 % pada Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029

Untuk mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis Politeknik KP Bone, diperlukan indikator kinerja utama (IKU) sebagai alat ukur pencapaian kinerja secara sistematis, terukur, dan akuntabel. IKU ini disusun berdasarkan pendekatan berbasis hasil (*result-based management*) yang mencerminkan capaian output dan outcome strategis dari setiap kegiatan inti.

Tabel berikut memuat indikator kinerja utama Politeknik KP Bone untuk periode tahun 2025–2029 yang mencakup bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola kelembagaan, serta dukungan manajemen lainnya. IKU ini menjadi dasar evaluasi kinerja tahunan dan bahan pemantauan capaian target strategis dalam kerangka pengembangan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berdampak langsung bagi masyarakat pesisir dan industri maritim nasional.



Tabel Indikator Kinerja Utama Politeknik KP Bone Tahun 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan*	Target 2025-2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik KP Bone yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	254	174	132	136	145
		2	Jumlah lulusan Politeknik KP Bone (Orang)	298	205	155	160	170
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik KP Bone yang kompeten (Orang)	728	520	485	505	525
		4	Nilai PNBP satker Politeknik KP Bone (Rp. Miliar)	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385
		5	Kerjasama Politeknik KP Bone yang disepakati (Kesepakatan)	2	2	2	2	2
		6	Persentase lulusan Politeknik KP Bone yang bersertifikasi kompetensi (%)	100	100	100	100	100
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik KP Bone (%)	100	100	100	100	100
	Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan tinggi kelautan dan perikanan	8	Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Bone (Paket)	3	4	4	4	4
		9	Pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Bone (kelompok)	1	3	3	3	3
	Terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan	10	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik KP Bone (Lembaga)	1	1	1	1	1
		11	Tenaga pendidik kelautan dan perikanan Politeknik KP Bone yang tersertifikasi (Orang)	35	35	35	35	35
	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan kelautan dan perikanan yang terstandar	12	Peralatan dan Mesin serta Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Politeknik KP Bone (Unit)		2	2	2	2
		13	Prasarana Pendidikan Menengah dan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Politeknik KP Bone (Unit)		1	1	1	1
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan	14	Unit Kerja Politeknik KP Bone yang dibangun berpredikat WBK/WBBM (unit kerja)	1	1	1	1	1
		15	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Bone (%)	85	85	85	85	85



Manusia Kelautan dan Perikanan	dan Perikanan	16	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Bone (Nilai)	81	82	83	84	85
		17	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Bone (Indeks)	84	85	86	87	88
		18	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Bone (%)	80	80	80	80	80
		19	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik KP Bone (%)	80	80	80	80	80
		20	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Bone (Nilai)	92	92	92	92	92
		21	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Bone (Nilai)	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5
		22	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik KP Bone (%)	100	100	100	100	100

Terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) Politeknik KP Bone Tahun 2025–2029, terdapat beberapa langkah strategis yang harus dilakukan agar target indikator tersebut dapat dicapai secara optimal. Berikut adalah rencana tindakan (action plan) yang disusun berdasarkan klaster kegiatan dan indikator:

1. Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Tujuan: Meningkatkan mutu dan daya saing lulusan.

Langkah yang harus dilakukan:

- Perkuat kurikulum berbasis industri (link and match) sesuai kebutuhan dunia kerja (indikator 1, 2, 3).
- Tingkatkan kerja sama magang dan rekrutmen dengan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri).
- Selenggarakan pelatihan sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa tingkat akhir (indikator 6).
- Optimalkan rekrutmen anak pelaku utama melalui program afirmasi dan sosialisasi ke wilayah sentra perikanan (indikator 7).
- Tingkatkan promosi dan seleksi calon peserta didik untuk menjaga kualitas input.
- Tingkatkan pelayanan pendidikan berbayar & pelatihan bersertifikat untuk menaikkan PNBP (indikator 4).



2. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Tujuan: Memperkuat peran institusi dalam pengembangan iptek terapan. Langkah yang harus dilakukan:

- a. Dorong dosen untuk melakukan kajian ilmiah vokasional berbasis kebutuhan lokal (indikator 8).
- b. Libatkan mahasiswa dan masyarakat dalam kegiatan pengabdian untuk memperluas dampak dan jangkauan (indikator 9).
- c. Integrasikan hasil penelitian ke dalam proses pembelajaran dan praktik kerja lapang (PKL).

3. Tata Kelola Pendidikan

Tujuan: Menjamin mutu dan keberlanjutan institusi. Langkah yang harus dilakukan:

- a. Persiapkan dan laksanakan reakreditasi institusi secara maksimal (indikator 10).
- b. Dorong seluruh tenaga pengajar untuk sertifikasi pendidik profesional dan pelatihan pedagogik (indikator 11).
- c. Implementasikan sistem manajemen mutu internal (SMPI) berbasis ISO atau SPMI.

4. Sarana dan Prasarana

Tujuan: Meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui fasilitas yang memadai.

Langkah yang harus dilakukan:

- a. Lakukan evaluasi dan modernisasi alat praktik dan laboratorium secara bertahap (indikator 12).
- b. Ajukan anggaran untuk peningkatan dan revitalisasi prasarana kampus melalui DIPA atau kerja sama (indikator 13).
- c. Manfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran (TIK) untuk mendukung metode blended learning.

5. Dukungan Manajemen dan Reformasi Birokrasi

Tujuan: Mewujudkan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Langkah yang harus dilakukan:

- a. Kembangkan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dengan penguatan sistem pengaduan, transparansi layanan, dan inovasi birokrasi (indikator 14).



- b. Tindak lanjut setiap hasil pengawasan secara sistematis dan masukkan ke dalam siklus perbaikan kinerja (indikator 15).
- c. Evaluasi berkala terhadap capaian SAKIP dan perbaikan dokumen perencanaan hingga pelaporan (indikator 16).
- d. Peningkatan profesionalisme ASN melalui pelatihan, coaching, dan sistem reward based performance (indikator 17).

Langkah Tambahan Umum

- a. Monitoring dan Evaluasi (Monev) rutin setiap semester dan tahunan untuk seluruh indikator.
- b. Penyusunan Rencana Aksi Tahunan (Annual Action Plan) untuk tiap unit kerja, disinkronkan dengan IKU.
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi kinerja (e-performance) agar pelaporan terintegrasi dan efisien.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi merupakan langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah yang berdampak nyata terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan nasional dan agenda prioritas RPJMN 2025 - 2029.

A. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

A.1. Strategi Pembangunan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029 strategi pembangunan nasional digariskan sebagai berikut :

1. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disusun berdasarkan RPJP Nasional.
2. RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
3. Dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan, Menteri melakukan pembinaan SDM perencana.
4. Dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan ditetapkan kementerian/lembaga koordinator dan kementerian/lembaga pengampu pada masing-masing prioritas nasional.
5. Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat mengoordinasikan penyusunan kebijakan/program/kegiatan pada Renstra-KL dan rencana kerja kementerian/ lembaga yang berkontribusi terhadap prioritas nasional sesuai dengan lingkup prioritas yang menjadi kewenangannya.
6. RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan



- a. dasar hukum bagi kementerian/ lembaga dalam menyusun Renstra-KL;
 - b. dasar hukum penyusunan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran Pembangunan Nasional yang termuat di dalam RPJM Nasional;
 - c. dasar hukum bagi Pemerintah dalam menyusun RKP;
 - d. pedoman dasar dalam dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional; dan
 - e. pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional.
7. RPJM Nasional memuat proyek strategis nasional.
 8. RPJM Nasional wajib ditaati oleh seluruh pelaku pemerintah dengan melibatkan pelaku pembangunan nonpemerintah.

A.2. Visi Pemerintah Yang Merupakan Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional

Visi : Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

A.3. Program atau Agenda Prioritas Pembangunan Nasional

Kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2025 - 2029 dirumuskan lebih lanjut dalam 8 (Delapan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional - Asta Cita). Antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.



7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

A.3.1. Program Prioritas Pemerintah

Program prioritas pemerintah terdiri dari 17 program antara lain :

1. Swasembada pangan, energi, dan air
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
5. Pemberantasan kemiskinan
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat: Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.



Dalam rangka menindak lanjuti program pemerintah Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone mengambil peran untuk menunjang pemerintah:

1. Mendukung swasembada pangan melalui pembentukan pengusaha perikanan yang terdidik;
2. Mendukung penerimaan negara dengan mengoptimalkan unit pelayanan kepada masyarakat.
3. Mengimplementasikan Reformasi birokrasi yang efektif dan efisien,
4. Menggalakkan Pencegahan dan pemberantasan korupsi mulai dari unsur pimpinan, staf dan seluruh taruna.
5. Melaksanakan kegiatan pendidikan untuk memberantas kemiskinan berfokus pada pelaku perikanan.

Upaya lain dalam mendukung program pemerintah pusat, Politeknik KP Bone juga mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebijakan Ekonomi Biru diimplementasikan dalam 5 program prioritas, yaitu:

1. Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota;
2. Pembangunan Budi daya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan;
3. Perluasan kawasan konservasi laut;
4. Pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil, dan;
5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Untuk percepatan pembangunan Politeknik KP Bone perlu Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan layanan publik yang baik.

- a) Pengelolaan dan pelayanan informasi secara berkualitas.
- b) Penyebaran informasi publik secara berkualitas melalui berbagai media center, media komunikasi dan media tradisional.
- c) Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan.



1) Pengembangan Kawasan Perbatasan

- a) Membangun sumber daya manusia (SDM) yang andal serta pemanfaatan pengetahuan dan teknologi (IPTEK) guna mengelola potensi lokal untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara yang berdaya saing.
- b) Mengembangkan kawasan konservasi di pulau-pulau kecil terluar.

2) Pengembangan Daerah Tertinggal

Mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal (pesisir, pulau-pulau kecil/terdepan/terluar) dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, potensi/posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan yang meliputi aspek pengembangan SDM.

3) Pembangunan Pedesaan

Pembangunan sumber daya manusia, keberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa pesisir dan masyarakat kelautan dan perikanan.

4) Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia

- a) Pembangunan Pendidikan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Meningkatkan relevansi pendidikan kelautan dan perikanan dengan kebutuhan dunia kerja, melalui pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri.
- b) Perbaikan Lingkungan Memperbaiki kualitas lingkungan masyarakat kelautan dan perikanan dengan upaya rehabilitasi, konservasi, pengendalian pencemaran, adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana.

5) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

a) Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi

1. Meningkatkan hasil penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek yang mendukung dalam keberlanjutan perikanan tangkap, pusat studi terumbu karang, pusat studi jasa kelautan
2. Peningkatan dukungan iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati (*Bioresources*) melalui peningkatan kegiatan penelitian



3. Penyusunan *roadmap* RIPTEK KP (Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan dan Perikanan)
4. Penguatan inovasi iptek kelautan dan perikanan melalui pengembangan kerja sama luar negeri dan kemitraan litbang antara Pemerintah-Perguruan Tinggi-Masyarakat-Swasta/Industri.
- b) Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Hasil Perikanan
 1. Peningkatan Mutu, Nilai Tambah dan Inovasi Teknologi Perikanan, melalui: i) Penguatan pengendalian, pengawasan dan advokasi mutu dan keamanan produk perikanan, sertifikasi dan standarisasi mutu dalam negeri (SNI) serta pengembangan dan penerapan sertifikasi *eco labelling* dan ketelusuran produk (*product traceability*), serta penanganan ikan yang baik (CPIB) dan penerapan sertifikasi hasil tangkapan ikan (SHTI), ii) Pengembangan diversifikasi produk olahan berbasis sumber daya ikan setempat; iii) Pengembangan inovasi riset dan intermediasi teknologi perikanan, iv) Peningkatan kemampuan daya saing industri pengolahan produk perikanan
 2. Penyempurnaan tata kelola perikanan, melalui : 1) pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM perikanan, peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan pendidikan Politeknik KP Bone
 3. Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan melalui : 1) Pungutan lembaga pengelola WPP, 2) Pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perikanan tangkap, 3) Penguatan standar pengelolaan perikanan ramah lingkungan, 4) Partisipasi aktif di dalam organisasi perikanan dunia untuk menjaga kepentingan nasional.
- 6) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestik
 - a) Peningkatan Kedaulatan Pangan melalui Peningkatan Produk Perikanan.
 1. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Usaha Perikanan untuk mendukung Ketahanan Pangan dan Gizi, melalui : i) penyediaan dan pengembangan teknologi penangkapan yang efisien dan ramah lingkungan; ii) pelatihan



dan penyuluhan terhadap pelaku utama/usaha KP dalam meningkatkan produktivitas usahanya.

2. Penguatan keamanan produk pangan perikanan, melalui : i) penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (*Good Handling Practices*) pada perikanan tangkap; ii) pengembangan produk perikanan berkualitas dan memenuhi standar *Hazard Analysis and Critical Control/HACCP* untuk menjamin keamanan produk dan mutu pangan olahan.

b) Kedaulatan energi.

1. Meningkatkan penggunaan energi yang ramah lingkungan untuk menggerakkan sarana sistem produksi
2. Pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber energi baru terbarukan di wilayah pulau-pulau kecil, terutama energi listrik tenaga surya.

c) Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

Penanganan kerusakan melalui pemulihan kembali/rehabilitasi ekosistem pesisir yang rusak, pengendalian pencemaran, serta upaya konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

d) Penanganan Perubahan Iklim dan Penyediaan Informasi Iklim dan Informasi Bencana.

1. Mengembangkan komoditas perikanan yang sesuai/tahan terhadap perubahan iklim
2. Menyebarluaskan teknologi inovatif dalam sistem produksi ikan untuk mengatasi perubahan iklim

e) Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

1. Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir yang difokuskan : i) Pengembangan wisata bahari di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk promosi, fasilitasi investasi di lokus andalan, ii) Pengembangan komoditas andalan kelautan lainnya, termasuk pengembangan energi laut dan bioteknologi laut di beberapa lokasi terpilih.
2. Terwujudnya SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari, difokuskan pada: i)



Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan sekurang-kurangnya 200.000 orang sampai tahun 2019; ii) Peningkatan IPTEK Kelautan dan diseminasi teknologi; serta iii) Penguatan dan revitalisasi budaya maritim

3. Meningkatkan Harkat dan Taraf Hidup Nelayan dan masyarakat pesisir melalui i) peningkatan kapasitas industri kecil melalui penyempurnaan pola kemitraan, pengembangan mata pencaharian alternatif, penumbuhan kebutuhan dasar masyarakat di pulau-pulau kecil, dan penguatan peran serta masyarakat pesisir dan kelangsungan hak masyarakat adat dan tradisional dalam menjaga kelestarian.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

B.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional dalam Rancangan awal RPJMN 2025- 2029 yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan, maka arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah :

- a. Meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
Isu pembangunan global dalam beberapa dekade ke depan antara lain mewujudkan kelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan secara global akan turut memberikan pengaruh besar terhadap keberlangsungan pembangunan kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tidak akan dilakukan secara eksplosif dan destruktif, melainkan mengedepankan penerapan prinsip-prinsip dasar pembangunan yang bertumpu pada kelestarian lingkungan (*sustainable development*) dan penegakan secara terpadu dan efektif.
- b. Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan bagi kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan
- c. Mengembangkan kompetensi SDM dan IPTEK inovatif yang berkepribadian
- d. Membangun kemandirian pemerintahan guna mewujudkan pranata, nilai-nilai dan jati diri kelembagaan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.



B.2. Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Untuk pelaksanaan arah kebijakan tersebut di atas, beberapa strategi yang akan ditempuh adalah :

- a. Meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, dilaksanakan dengan strategi:

- 1) Penerapan manajemen kuota penangkapan.

Sumber daya ikan merupakan yang tidak terbatas, sehingga pembatasan pemanfaatannya perlu menjadi strategi agar perikanan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Manajemen kuota penangkapan merupakan tindakan pengendalian dari sisi *output* kegiatan perikanan (*output control*) dengan menetapkan jumlah ikan yang diperbolehkan untuk ditangkap dan dialokasikan baik untuk nelayan maupun untuk industri. Penerapan jumlah ikan yang diperbolehkan ditangkap turut mempertimbangkan jumlah populasi ikan yang tetap di laut untuk dapat terus berkembang biak, sehingga penerapan strategi ini memberikan dampak terhadap keberlanjutan sumber daya ikan.

- 2) Perlindungan spesies tertentu

Posisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa memberikan keuntungan biodiversitas fauna. Beberapa spesies termasuk dalam spesies akuatik yang dilindungi. Kementerian Kelautan dan Perikanan turut mendukung kelestarian sumber daya ikan yang terancam punah melalui upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan berkelanjutan untuk spesies tertentu sebanyak 20 jenis prioritas.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menertibkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait perlindungan jenis ikan yaitu :

- a) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.59/MEN/2011 tentang Penerapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk (*Tenulosa macrura*),
- b) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/KEPMEN.KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhyncodon typus*),



- c) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.37/KEPMEN.KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Ikan Napoleon (*Chellinus undulatus*),
 - d) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.4/KEPMEN.KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Ikan Pari Manta (*Manta spp*).
 - e) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.46/KEPMEN.KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan terbatas Bambu Laut (*Isis spp*).
- 3) Pengembangan kawasan ekowisata maritim
- Kegiatan ekowisata maritim atau wisata bahari, sudah berjalan dengan baik di beberapa kawasan pesisir. Namun potensi ekowisata maritim yang masih sangat besar belum tergarap dan dikembangkan secara optimal sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, strategi pengembangan kawasan ekowisata maritim akan melibatkan Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, pihak dunia usaha/investor serta masyarakat pesisir .
- 4) Pengaturan alat tangkap ramah lingkungan dan penertiban rumpon di ZEE
- Hak menangkap ikan yang diberikan kepada industri maupun nelayan harus disertai dengan kewajiban menangkap ikan dengan cara yang bertanggungjawab. Pemilihan alat tangkap memerlukan kriteria selektif dan ramah lingkungan untuk mencegah kerusakan habitat maupun sumber daya kelautan dan perikanan lainnya. Oleh karena itu Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan strategi pengaturan alat tangkap ramah lingkungan dan penertiban rumpon di ZEEI untuk mencapai pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
- 5) Pendugaan stok sumber daya ikan, pemantauan kapasitas penangkapan ikan, pengembangan *observer* di atas kapal, penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), termasuk penyusunan pedoman pengelolaan sumber daya perikanan di daerah (perizinan penangkapan ikan, ukuran dan jenis alat tangkap), dan penguatan statistik perikanan.



Dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan strategi penguatan statistik perikanan, pemantauan kapasitas penangkapan ikan, dan *stock assesmen* serta pengaturan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) untuk dapat mengetahui lebih akurat kondisi sumber daya perikanan dan menetapkan rencana pengelolaan sumber daya perikanan.

6) Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan organisasi perikanan regional (RFMO)

Posisi Indonesia berdekatan dengan wilayah *spawning ground Southern Bluefin Tuna* (SBIT) yang berada di selatan Jawa dan Bali. Selain itu posisi *Coral Triangel* diduga dekat dengan wilayah *spawning ground* tuna lainnya seperti *yellowfin* tuna dan *Bigeye Tuna* di wilayah pasifik. *Baby Tuna* mencari makan di wilayah perairan yang kaya akan nutrien dan ikan kecil, yaitu di sekitar perairan pantai.

7) Penguatan kerjasama regional dan internasional

Kerjasama regional dan internasional terus digagas dan di galang dalam rangka pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Upaya yang sering dilakukan antara lain melalui Prakarsa Segitiga untuk Terumbu Karang. Perikanan dan Ketahanan Pangan atau *Coral Triangle Initiative on Coral Reef, Fisheries and Food Security* (CTI-CFF) untuk melestarikan sumber daya laut dan pesisir di enam Negara di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik dan *MoU Box* dengan Australia.

b. Mengembangkan Kompetensi SDM Dan Iptek Inovatif yang Berkepribadian.

Dilaksanakan dengan strategi :

- 1) Peningkatan kapasitas SDM KP berbasis kompetensi dan penciptaan SDM baru terampil dan ahli;
- 2) Peningkatan keterampilan masyarakat dalam penerapan iptek dan teknologi tepat guna;
- 3) Pemberian akses pendidikan bagi anak pelaku utama di satuan pendidikan lingkup KKP;
- 4) Penyelenggaraan program pendidikan vokasi bidang KP dengan pendekatan *Teaching Factory*;



- 5) Peningkatan kapasitas kelembagaan pendidikan sebagai pusat rujukan dan lembaga sertifikasi SDM KP;
 - 6) Meningkatkan kerja sama kemitraan dengan para pihak dalam rangka pengkayaan/pemanfaatan sumber belajar, penguatan kelembagaan dan kerja sama untuk peningkatan kapasitas SDM KP;
 - 7) Pengembangan materi uji kompetensi keahlian bidang KP;
 - 8) Pengembangan Pusat Kajian/inovasi teknologi sebagai sumber belajar bagi peserta didik dan masyarakat;
 - 9) Pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri;
 - 10) Pengembangan budaya dan wawasan bahari (maritim) melalui pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan, melestarikan nilai budaya, wawasan bahari serta revitalisasi hukum adat dan kearifan lokal terkait dengan tata kelola sumber daya kelautan, dan melindungi dan merevitalisasi peninggalan budaya bawah laut.
- c. Membangun kemandirian pemerintahan guna mewujudkan pranata, nilai-nilai dan jati diri kelembagaan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Transparansi dan modernisasi sistem data dan informasi perikanan (*open government policy*);
 - 2) Penerapan manajemen kinerja melalui penerapan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dan pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja;
 - 3) Integrasi sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja KKP;
 - 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan manajemen pengendalian kinerja pelayanan publik;
 - 5) Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kelautan dan Perikanan;
 - 6) Penyiapan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan;
 - 7) Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, berbasis kompetensi dan profesionalisme yang berkepribadian;
 - 8) Pengembangan Budaya kerja;



- 9) Peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- 10) Penerapan sistem pengawasan internal yang profesional dan sinergis;
- 11) Penerapan *e-gouvernement* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern;
- 12) Peningkatan efektifitas implementasi pencegahan dan kebijakan anti korupsi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

B.3. Quickwins dan Program Lanjutan

Quick wins merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang dijalankan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Program *Quick wins* Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dirancang untuk periode antara lain :

1. Pencanangan Pembangunan *Techno Park* berbasis Perikanan Rakyat, melalui : pembangunan *techno park* berbasis pendidikan;
2. Pengembangan kawasan ekowisata maritim melalui partisipasi dalam Pekan Wisata Maritim.

C. Arah dan Strategi Pengembangan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone

C.1. Arah Kebijakan Pengembangan PKP Bone

Arah kebijakan Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Bone dalam periode lima tahun ke depan dirancang untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional di sektor kelautan dan perikanan. Fokus utama diarahkan pada penguatan ekonomi biru (blue economy) sebagai strategi pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya laut secara bijak, produktif, dan ramah lingkungan. Hal ini mencakup peran pendidikan vokasi dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memahami prinsip keberlanjutan dan konservasi dalam aktivitas kelautan dan perikanan.

Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan Poltek KP Bone juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas SDM vokasi yang kompeten dan adaptif terhadap



perubahan kebutuhan industri. Melalui pendekatan kurikulum berbasis kompetensi yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), lembaga ini berupaya mencetak lulusan yang siap pakai, berdaya saing tinggi, dan memiliki etos kerja profesional. Pengembangan kualitas lulusan juga didorong melalui peningkatan kualitas pengajaran, praktik lapangan, serta kerja sama strategis dengan mitra industri dan lembaga riset.

Selain itu, sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi yang berada di wilayah strategis Kawasan Timur Indonesia, Poltek KP Bone diarahkan untuk menjadi pusat unggulan dalam pengembangan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan. Lembaga ini diharapkan dapat berperan sebagai motor penggerak pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pendidikan, pelatihan, dan inovasi teknologi terapan. Penguatan peran tersebut dilakukan dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperluas jaringan kemitraan, serta mengembangkan program-program yang responsif terhadap tantangan lokal dan nasional di sektor kelautan dan perikanan.

Secara spesifik, arah kebijakan Politeknik KP Bone mencakup:

- a. Penguatan kualitas dan daya saing lulusan vokasi dalam sektor kelautan dan perikanan.

Poltek KP Bone berkomitmen untuk mencetak lulusan vokasi yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga adaptif terhadap perubahan teknologi, kebutuhan industri, serta tantangan global di sektor kelautan dan perikanan. Penguatan kualitas lulusan dilakukan melalui penerapan kurikulum berbasis kompetensi yang terintegrasi dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), serta bersinergi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Pembelajaran berorientasi praktik, pelatihan sertifikasi, dan magang industri menjadi bagian penting dalam membekali mahasiswa dengan keahlian yang relevan dan aplikatif.

Selain itu, daya saing lulusan diperkuat melalui pembinaan karakter kerja, kemampuan kewirausahaan berbasis hasil laut dan pesisir, serta penguasaan teknologi digital yang mendukung aktivitas perikanan modern. Dengan pendekatan ini, lulusan Poltek KP Bone diharapkan mampu menjadi tenaga profesional yang produktif di sektor perikanan tangkap, budidaya,



pengolahan hasil perikanan, serta bidang-bidang pendukung lainnya, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pendidikan vokasi yang akuntabel, transparan, dan berbasis teknologi.

Peningkatan kapasitas kelembagaan dilakukan melalui penguatan struktur organisasi, pembenahan manajemen internal, serta peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di semua unit kerja. Tata kelola institusi diarahkan agar memenuhi prinsip-prinsip good governance, termasuk akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efisiensi. Dalam kerangka ini, perencanaan dan pengambilan keputusan strategis didasarkan pada data dan indikator kinerja yang terukur.

Implementasi teknologi informasi juga menjadi bagian integral dari tata kelola modern. Poltek KP Bone berupaya membangun sistem informasi akademik, keuangan, dan administrasi yang terintegrasi dan berbasis digital. Digitalisasi proses kerja ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan, tetapi juga mempermudah pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta pelaporan kinerja lembaga secara real-time.

- c. Pengembangan riset terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pembangunan perikanan berkelanjutan.

Sebagai institusi pendidikan vokasi, Poltek KP Bone menekankan pentingnya riset terapan yang berorientasi pada penyelesaian masalah riil di sektor kelautan dan perikanan. Riset yang dikembangkan diarahkan untuk mendukung inovasi teknologi budidaya, tangkap, pengolahan hasil perikanan, serta mitigasi dampak lingkungan. Hasil-hasil penelitian ini selanjutnya diupayakan untuk dapat langsung diimplementasikan di lapangan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Program pengabdian diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat pesisir dan pelaku usaha kecil-menengah (UKM) dalam memanfaatkan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Melalui transfer teknologi, pelatihan, pendampingan, dan sinergi dengan pemerintah daerah, Poltek KP Bone berkontribusi dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Inisiatif ini juga menjadi wahana pembelajaran langsung bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.



- d. Pemantapan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir.

Dalam rangka memperluas daya jangkau dan dampak pendidikan vokasi, Poltek KP Bone memantapkan kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kerja sama dengan pemerintah daerah difokuskan pada penguatan program-program vokasi yang mendukung agenda pembangunan wilayah pesisir dan pengembangan potensi perikanan daerah. Kemitraan ini diwujudkan dalam bentuk kerja sama pendidikan, pelatihan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Hubungan dengan pelaku usaha dan industri juga menjadi perhatian utama, terutama dalam pelaksanaan magang, penyusunan kurikulum, serta penyediaan peluang kerja bagi lulusan. Sementara itu, kemitraan dengan komunitas pesisir dimaksudkan untuk membangun ekosistem sosial yang mendukung pendidikan partisipatif dan pemberdayaan berbasis komunitas. Kolaborasi ini akan memperkuat relevansi dan keberlanjutan program-program Poltek KP Bone dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat dan industri.

- e. Pengarusutamaan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya maritim dalam proses pembelajaran dan pengembangan institusi.

Sebagai institusi yang berada di wilayah dengan kekayaan budaya bahari yang kuat, Poltek KP Bone mengarusutamakan nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pendidikan dan pengembangan kelembagaan. Nilai-nilai seperti gotong royong, keselarasan dengan alam, penghormatan terhadap laut, serta adat istiadat masyarakat pesisir diintegrasikan dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter mahasiswa. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat identitas kemaritiman dan rasa kepemilikan terhadap sumber daya laut sebagai aset bersama.

Lebih jauh, pengarusutamaan budaya maritim juga dilakukan dalam pengembangan kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, serta perumusan kebijakan kelembagaan. Poltek KP Bone mendorong pemanfaatan seni, tradisi lokal, serta bahasa daerah dalam mendukung pembelajaran kontekstual dan pembentukan ekosistem kampus yang inklusif. Dengan demikian, pendidikan vokasi yang dikembangkan tidak terlepas dari akar budaya lokal, namun tetap mampu menjawab tantangan global secara adaptif dan inovatif.



C.2. Strategi Pengembangan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, strategi Politeknik KP Bone difokuskan pada empat pilar utama sebagai berikut:

C.2.1. Strategi Pengembangan SDM

- 1) Revitalisasi kurikulum berbasis link and match dengan dunia usaha dan industri (DUDI).

Revitalisasi kurikulum berbasis link and match dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) merupakan langkah strategis yang dilakukan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone untuk memastikan kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja. Melalui pendekatan ini, kurikulum tidak hanya disusun berdasarkan standar akademik, tetapi juga dirancang bersama dengan mitra industri guna menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, tren usaha, dan tantangan di sektor kelautan dan perikanan. Proses pembelajaran diarahkan agar lebih aplikatif dan kontekstual, dengan porsi praktik kerja lapangan yang memadai serta integrasi pengalaman langsung dari dunia kerja. Selain itu, keterlibatan DUDI dalam penyusunan materi ajar, pemberian pelatihan, dan penilaian kompetensi mahasiswa menjadi wujud nyata dari kolaborasi yang saling menguntungkan. Dengan demikian, lulusan Poltek KP Bone diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan teknis yang mumpuni, tetapi juga siap kerja, adaptif, dan memiliki keunggulan kompetitif di tengah persaingan global.

- 2). Peningkatan kualitas dosen dan instruktur melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan pendidikan lanjut.

Peningkatan kualitas dosen dan instruktur merupakan kunci dalam menjamin mutu pembelajaran vokasi di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Upaya ini dilakukan secara sistematis melalui penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang bertujuan untuk memperbarui wawasan dan keterampilan pedagogik serta teknis sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri. Selain itu, sertifikasi kompetensi bagi tenaga pengajar menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki keahlian spesifik yang terstandar dan diakui secara profesional. Program pendidikan lanjut seperti studi magister atau doctoral juga didorong sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan kapasitas



akademik dan kualitas riset para dosen. Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan dosen dan instruktur tidak hanya mampu mengajar secara efektif, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu mentransformasi pendidikan vokasi agar lebih relevan, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

- 3). Penerapan metode pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) dan industri (industrial work placement).

Penerapan metode pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) dan penempatan kerja industri (industrial work placement) menjadi salah satu strategi unggulan dalam meningkatkan kompetensi praktis mahasiswa Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Pendekatan ini mendorong mahasiswa untuk belajar melalui pengalaman langsung dalam menyelesaikan permasalahan nyata yang dihadapi di sektor kelautan dan perikanan, baik melalui proyek internal kampus maupun kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Dalam project-based learning, mahasiswa dilatih untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu kegiatan atau produk berbasis ilmu terapan, sehingga keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif dapat terasah secara optimal. Sementara itu, industrial work placement memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk magang secara langsung di perusahaan, unit produksi, atau instansi terkait, sehingga mereka dapat memahami dinamika kerja, budaya industri, dan tuntutan profesionalisme secara riil. Melalui metode ini, lulusan diharapkan lebih siap memasuki dunia kerja dan mampu bersaing secara kompetitif di pasar tenaga kerja vokasi.

C.2.2. Strategi Penguatan Sarana-Prasarana dan Digitalisasi

- 1). Modernisasi fasilitas laboratorium, teaching factory, dan kapal latih.

Modernisasi fasilitas laboratorium, teaching factory, dan kapal latih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis praktik di lingkungan pendidikan vokasi. Pembaruan sarana dan peralatan laboratorium dilakukan agar selaras dengan teknologi industri terkini, sehingga mahasiswa dapat berlatih menggunakan peralatan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Revitalisasi teaching factory juga menjadi fokus utama untuk mengintegrasikan proses belajar dengan praktik industri secara langsung di lingkungan kampus. Sementara itu, peningkatan kualitas kapal latih, baik dari aspek kelayakan teknis maupun fungsionalitas, ditujukan untuk memperkuat pengalaman belajar peserta didik dalam simulasi kerja nyata di laut. Keseluruhan upaya ini



bertujuan untuk mencetak lulusan yang kompeten, siap kerja, dan mampu bersaing di dunia industri kelautan dan perikanan.

2). Digitalisasi layanan akademik, administrasi, dan sistem informasi manajemen.

Digitalisasi layanan akademik, administrasi, dan sistem informasi manajemen dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Melalui pengembangan sistem yang terintegrasi, berbagai layanan seperti pendaftaran mahasiswa baru, pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), pemantauan nilai akademik, hingga layanan administrasi kepegawaian dan keuangan dapat diakses secara mudah dan cepat. Implementasi teknologi informasi ini tidak hanya mempercepat proses pelayanan, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making). Dengan sistem manajemen informasi yang kuat, institusi pendidikan dapat bergerak lebih adaptif, responsif, dan profesional dalam menjawab tantangan dinamika pendidikan vokasi saat ini.

3). Penguatan sistem pembelajaran daring dan hybrid.

Dalam menghadapi tantangan zaman dan meningkatkan jangkauan layanan pendidikan, penguatan sistem pembelajaran daring dan hybrid menjadi suatu keharusan. Pengembangan platform pembelajaran digital memungkinkan proses belajar mengajar berlangsung secara fleksibel tanpa dibatasi ruang dan waktu. Model hybrid learning yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan metode daring memberikan keleluasaan bagi dosen dan mahasiswa dalam mengatur strategi pembelajaran yang efektif dan inovatif. Selain itu, pemanfaatan berbagai media digital, video tutorial, forum diskusi, serta asesmen daring turut memperkaya metode pengajaran dan meningkatkan interaktivitas. Strategi ini tidak hanya memberikan kemudahan akses, tetapi juga mempersiapkan peserta didik agar lebih adaptif terhadap ekosistem kerja digital dan teknologi masa depan

C.2.3. Strategi Kolaborasi dan Kemitraan

1) Peningkatan kerja sama dengan mitra strategis dalam negeri dan luar negeri.

Peningkatan kerja sama dengan mitra strategis, baik di dalam maupun luar negeri, merupakan langkah penting dalam memperluas jaringan dan memperkuat kapasitas institusi pendidikan vokasi. Kerja sama ini meliputi berbagai bidang seperti pertukaran dosen dan mahasiswa, pengembangan kurikulum bersama, pelatihan berbasis industri, hingga kerja sama riset terapan. Dengan menjalin



kemitraan internasional, institusi dapat mengadopsi praktik terbaik dari berbagai negara dan memperkenalkan peserta didik pada standar global. Sementara itu, kolaborasi dalam negeri memperkuat sinergi antar lembaga pendidikan, instansi pemerintah, dan pelaku industri nasional, guna mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

2). Pengembangan program magang, penelitian bersama, dan joint venture dalam teaching industry.

Pengembangan program magang, penelitian bersama, dan joint venture dalam teaching industry merupakan strategi konkret dalam mewujudkan pendidikan vokasi yang berbasis pada kebutuhan nyata dunia kerja. Program magang yang terstruktur memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman langsung di lingkungan industri, sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan kesiapan kerja mereka. Selain itu, kolaborasi dalam penelitian terapan memungkinkan dosen dan mahasiswa berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan industri sekaligus memperkaya wawasan akademik. Melalui joint venture dalam teaching industry, institusi pendidikan dan mitra industri dapat mengembangkan unit produksi bersama yang tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi, menciptakan inovasi, dan mendorong kemandirian institusi.

3). Pendekatan quadruple helix (pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat).

Pendekatan quadruple helix mengintegrasikan empat elemen utama — pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat — dalam pembangunan ekosistem pendidikan dan inovasi. Model kolaboratif ini menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan vokasi yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator kebijakan, akademisi sebagai penghasil pengetahuan dan sumber daya manusia terampil, industri sebagai pengguna lulusan dan mitra penerapan teknologi, serta masyarakat sebagai penerima manfaat langsung. Dengan menerapkan pendekatan ini, institusi pendidikan tidak hanya menjadi pusat belajar, tetapi juga agen perubahan sosial dan ekonomi yang berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional.



C.2.4. Strategi Tata Kelola dan Kelembagaan

1) Penguatan tata kelola berbasis prinsip good governance.

Penguatan tata kelola lembaga dilakukan dengan mengedepankan prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan. Prinsip ini menjadi landasan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan program dan kegiatan secara profesional dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan tata kelola yang baik, institusi pendidikan dapat membangun kepercayaan publik, memperkuat integritas kelembagaan, serta menciptakan sistem manajemen yang adaptif terhadap perubahan dan tuntutan zaman. Good governance juga menjadi prasyarat penting dalam menciptakan iklim kerja yang sehat dan berorientasi pada mutu.

2) Peningkatan kapasitas organisasi melalui perencanaan berbasis kinerja (performance-based planning).

Untuk mewujudkan lembaga yang efisien dan responsif, peningkatan kapasitas organisasi dilakukan melalui pendekatan perencanaan berbasis kinerja (performance-based planning). Strategi ini menekankan pentingnya keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran hasil, dan tindak lanjut berbasis indikator kinerja yang terukur. Setiap unit kerja didorong untuk merancang program dan kegiatan yang berorientasi pada output dan outcome yang nyata, bukan sekadar memenuhi prosedur administratif. Dengan sistem ini, lembaga dapat melakukan evaluasi berkelanjutan, mengidentifikasi area perbaikan, serta menetapkan prioritas pembangunan kelembagaan secara lebih terarah dan efisien.

3) Pengembangan budaya kerja unggul dan integritas tinggi di lingkungan civitas akademika.

Pengembangan budaya kerja unggul dan berintegritas tinggi menjadi fondasi penting dalam membangun institusi yang profesional dan berdaya saing. Seluruh sivitas akademika didorong untuk menjunjung tinggi etos kerja, tanggung jawab, inovasi, serta semangat kolaboratif dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu, penguatan nilai-nilai integritas seperti kejujuran, disiplin, dan kepatuhan terhadap aturan dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan bagi individu atau unit kerja yang menunjukkan kinerja dan perilaku terbaik. Budaya kerja yang positif ini diharapkan menjadi identitas lembaga sekaligus daya dorong utama dalam mencapai visi dan



misal institusi secara berkelanjutan.

D. Kerangka Regulasi

Pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pengembangan Politeknik KP Bone memerlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembuatan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur penyelenggara organisasi. Dalam Rencana Strategis Politeknik KP Bone 2025 – 2029, kerangka regulasi yang disiapkan mengacu kepada program regulasi nasional yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Rencana Strategis Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pusat Pendidikan KP yang meliputi :

1. Peraturan Menteri KP Nomor 8/PERMEN-KP/2015 tentang Kurikulum Politeknik Kelautan dan Perikanan;
2. Peraturan Menteri KP Nomor 5/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone;
3. Rancangan Peraturan Menteri tentang Sertifikasi Sumber Daya Manusia Untuk Memenuhi Kebutuhan Industri Kelautan dan Perikanan.
4. Rancangan Peraturan Menteri tentang Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan.
5. Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan Jangka Pendek;
6. Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penetapan Rencana Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan;
7. Rancangan Peraturan Menteri tentang Standar Kurikulum Perguruan Tinggi Bidang Pendidikan;
8. Perubahan Permen KP tentang Statuta Politeknik KP Sidoarjo, Politeknik KP Bitung, Politeknik KP Sorong, Politeknik KP Karawang, Politeknik KP Kupang, Politeknik KP Bone.

E. Kerangka Kelembagaan

Renstra KKP Tahun 2025 – 2029 menyatakan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yakni :

1. Perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan



dari production oriented ke people oriented.

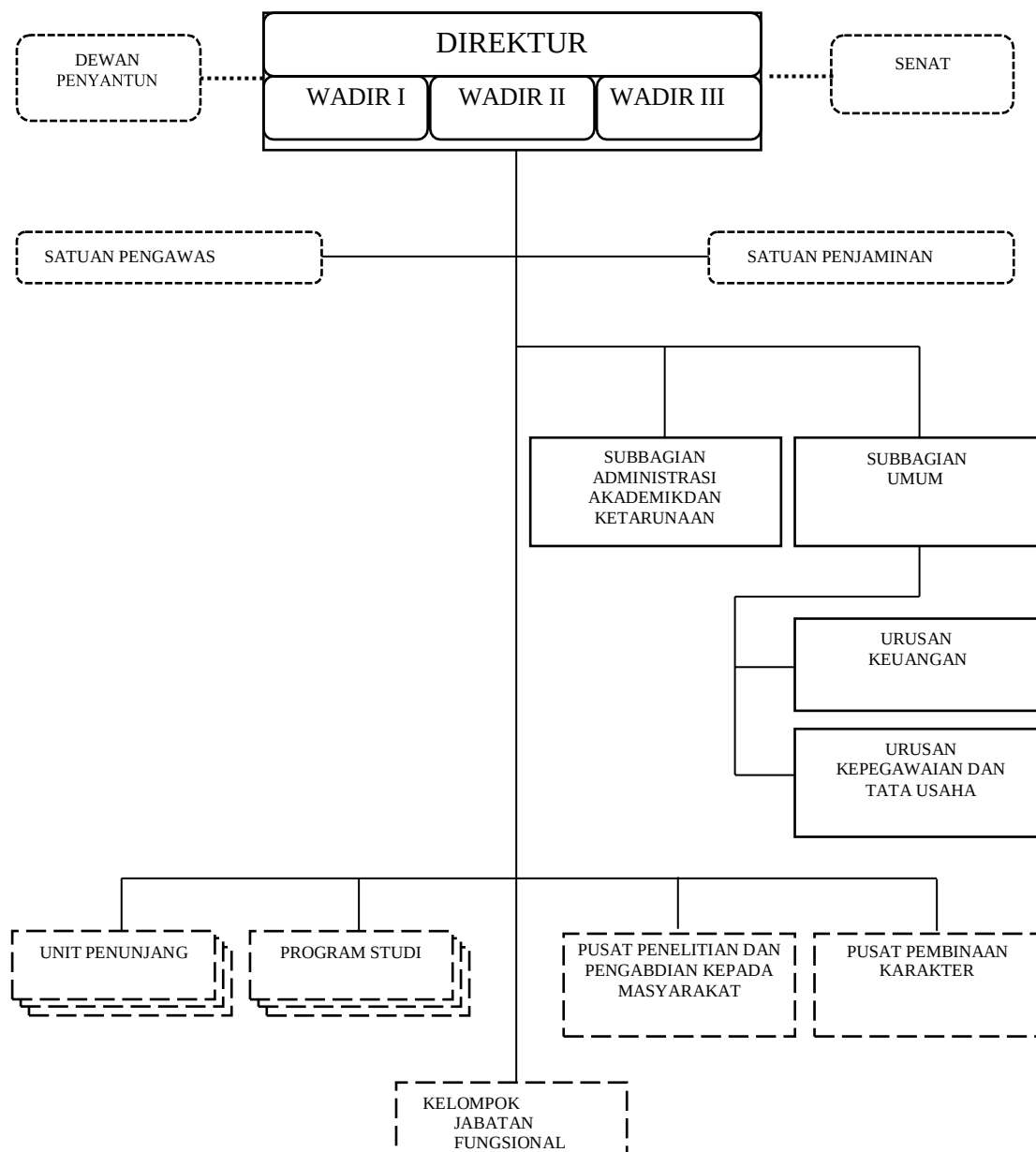
2. Mandat yang diberikan meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.
3. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
4. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang right sizing, unified function, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses (Business Process Management) pembangunan kelautan dan perikanan.
5. Penguatan mutu kelembagaan satuan pendidikan KP

Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone merupakan pendidikan tinggi yang diharapkan memegang posisi terdepan, dan menjadi pelopor pembaharuan serta rujukan dalam disiplin ilmu pada 3 (tiga) bidang keahlian tersebut yang nantinya akan menghasilkan Ahli Madya Perikanan, khususnya di bidang Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan, Ahli Budidaya Perikanan dan Ahli Teknik Kelautan yang dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan Negara. Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone senantiasa berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran hakiki dan universal, keilmuan, kebebasan mimbar dan kebebasan akademik, keadilan, demokrasi, hak asasi manusia, taat hukum, menghargai kemajemukan dan kemitraan, edukatif, ilmiah, dan religius

Politeknik KP Bone melaksanakan Program Pendidikan Diploma III yang saat ini memiliki 3 program studi yaitu :

1. Program Studi Teknik Penangkapan Ikan;
2. Program Studi Teknik Budidaya Ikan; dan
3. Program Studi Teknik Kelautan.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11/PERMEN-KP/2022 tentang STATUTA Politeknik KP Bone, maka Struktur Organisasi Politeknik KP Bone adalah sebagai berikut :



Gambar 4. Struktur Organisasi Politeknik KP Bone

Dalam rangka mewujudkan Politeknik KP Bone sebagai lembaga pendidikan vokasi yang unggul, adaptif, dan responsif terhadap tantangan zaman, penguatan kelembagaan menjadi pilar utama yang harus dibangun secara bertahap dan berkesinambungan. Kelembagaan yang kuat tidak hanya ditandai oleh struktur yang rapi, tetapi juga oleh sistem tata kelola yang efisien, akuntabel, dan berorientasi pada mutu. Oleh karena itu, upaya penguatan kelembagaan perlu diarahkan pada beberapa aspek mendasar berikut ini:



1. Pengembangan struktur yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan industri perikanan.
Dalam rangka mendukung penguatan kelembagaan, pengembangan struktur organisasi yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan industri perikanan menjadi langkah strategis yang sangat penting. Dunia usaha dan industri perikanan terus mengalami perkembangan pesat, baik dari sisi teknologi, regulasi, maupun kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, struktur kelembagaan harus mampu merespons perubahan tersebut secara fleksibel dan progresif, termasuk dengan merevitalisasi peran unit-unit kerja yang relevan serta mendorong integrasi lintas sektor dalam tata kelola kelembagaan.

Struktur yang adaptif juga memungkinkan institusi untuk lebih cepat menyesuaikan kurikulum, program pelatihan, dan layanan pendukung lainnya sesuai dengan tuntutan pasar kerja dan kebutuhan mitra industri. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembentukan unit layanan terpadu, forum komunikasi dengan pelaku industri, serta penguatan fungsi pusat pengembangan kompetensi. Dengan demikian, kelembagaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi katalisator utama dalam mencetak lulusan yang siap pakai dan mendukung pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

2. Penataan peran dan fungsi unit-unit kerja secara efisien dan berbasis kinerja.

Penataan peran dan fungsi unit-unit kerja secara efisien dan berbasis kinerja merupakan fondasi penting dalam mendukung penguatan kelembagaan yang profesional dan akuntabel. Dalam konteks institusi pendidikan vokasi kelautan dan perikanan, setiap unit kerja harus memiliki tanggung jawab yang jelas, terukur, dan saling melengkapi. Penataan ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi, pembagian tugas yang proporsional, serta penghapusan tumpang tindih kewenangan agar tercipta alur kerja yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan institusi maupun pemangku kepentingan.

Penerapan prinsip efisiensi yang dibarengi dengan sistem berbasis kinerja akan mendorong budaya kerja yang produktif dan kompetitif. Unit-unit kerja perlu didorong untuk menyusun indikator kinerja utama (IKU) yang relevan dan terukur, serta secara berkala dievaluasi melalui sistem monitoring dan evaluasi yang transparan. Dengan demikian, setiap unit dapat menunjukkan kontribusi nyatanya terhadap pencapaian tujuan strategis lembaga, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang adaptif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil.



3. Implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang berkelanjutan.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berkelanjutan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang berkualitas dan akuntabel. SPMI berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh proses akademik maupun non-akademik di lingkungan institusi berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), institusi dapat mengidentifikasi kelemahan, memperbaiki proses secara sistematis, serta membangun budaya mutu di seluruh lapisan organisasi.

Keberlanjutan pelaksanaan SPMI menuntut adanya komitmen dari seluruh civitas akademika serta penguatan kapasitas unit penjaminan mutu sebagai motor penggerak evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan menerapkan SPMI secara konsisten, institusi tidak hanya memenuhi tuntutan regulasi, tetapi juga meningkatkan daya saing dan kepercayaan dari pemangku kepentingan, termasuk peserta didik, mitra industri, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan melalui SPMI yang berkelanjutan menjadi landasan penting dalam menciptakan lembaga pendidikan yang unggul, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan zaman.



BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Indikator Kinerja

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis diukur menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP yang ingin dicapai menggunakan Indikator kinerja kegiatan sebagai alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan berupa keluaran (*output*) yang dibiayai oleh anggaran (*input*). Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara *specific, measurable, achievable, reliable, and timebond (smart)*.

Program dan kegiatan yang direncanakan sebagai strategi pencapaian tujuan dan sasaran Politeknik KP Bone akan diukur keberhasilannya dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Selama 5 tahun ke depan Politeknik KP Bone telah menetapkan target kinerja dan sinkronisasi antara Sasaran Strategis Politeknik KP Bone dengan IKU dan Indikator Kinerja (IK) yang akan menunjang pencapaian IKU Politeknik KP Bone dari Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini;

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Politeknik KP Bone Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik KP Bone yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	254	174	132	136	145
		1.1	Jumlah lulusan Politeknik KP Bone yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan (Orang)					
		1.2	Jumlah lulusan Politeknik KP Bone yang bekerja dibidang kelautan dan perikanan (Orang)					



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama		Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	
			1.3	Jumlah lulusan Politeknik KP Bone yang bekerja di luar negeri (Orang)					
			1.4	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan (Persen)					
		2		Jumlah lulusan Politeknik KP Bone (Orang)	298	205	155	160	170
			2.1	Jumlah lulusan memiliki rata-rata IPK > 3	298	205	155	160	170
			2.2	Jumlah lulusan memiliki rata-rata IPK < 3	0	0	0	0	0
			2.3	Jumlah Taruna/Taruni yang lulus tepat waktu	298	205	155	160	170
		3		Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik KP Bone yang kompeten (Orang)	728	520	485	505	525
			3.1	Jumlah Taruna/Taruni yang memiliki sertifikat kompetensi	728	520	485	505	525
			3.2	Persentase Taruna/Taruni lulus uji kompetensi	100 %				
		4		Nilai PNBSP satker Politeknik KP Bone (Rp. Miliar)	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385
		5		Kerjasama Politeknik KP Bone yang disepakati (Kesepakatan)	2	2	2	2	2
			5.1	Jumlah kerjasama tingkat lokal					
			5.2	Jumlah kerjasama tingkat nasional					
			5.3	Jumlah kerjasama tingkat internasional					
			5.4	Jumlah mitra penempatan lulusan					
		6		Persentase lulusan Politeknik KP Bone yang bersertifikasi kompetensi (%)	100	100	100	100	100
			6.1	Jumlah lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi					
		7		Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik KP Bone (%)	100	100	100	100	100
			7.1	Jumlah anak pelaku utama yang mendaftar di Politeknik KP Bone					
			7.2	Jumlah anak pelaku utama yang diterima di Politeknik KP Bone	160				
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan	8		Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Bone (Paket)	3	4	4	4	4
			8.1	Setiap program studi memiliki peta jalan penelitian terapan	1	1	1	1	1
			8.2	Jumlah penelitian terapan	3	4	4	4	4



No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Utama	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	
			8.3	Jumlah publikasi nasional terakreditasi	5	5	6	7	7
			8.4	Jumlah publikasi internasional	3	3	4	4	5
			8.5	Jumlah publikasi internasional bereputasi	3	3	3	3	3
			8.6	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Dosen	3	3	4	4	5
			8.7	Jumlah hasil penelitian yang didesiminasi	3	3	3	3	3
			8.8	Jumlah penelitian yang terintegrasi dalam pembelajaran	3	3	3	3	3
		9		Pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Bone (Kelompok)	1	3	3	3	3
			9.1	Setiap program studi memiliki peta jalan penelitian terapan	1	1	1	1	1
			9.2	Jumlah kegiatan PkM	3	3	3	3	3
			9.3	Jumlah kegiatan pelatihan terhadap masyarakat	2	2	2	2	2
			9.4	Jumlah PkM yang terintegrasi dalam pembelajaran	3	3	3	3	3
		3	Terselenggaranya Tata Kelola Pendidikan Kelautan dan Perikanan	10		Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada PKP Bone (Lembaga)	1	1	1
		10.1	Jumlah Dosen yang berkualifikasi Doktor (Orang)						
		10.2	Jumlah Dosen yang berkualifikasi Magister (Orang)						
		10.3	Jumlah Dosen jabatan lektor kepala (Orang)						
		10.4	Jumlah Dosen jabatan lector (Orang)						
		10.5	Jumlah Dosen jabatan asisten ahli (Orang)						
		10.6	Jumlah Taruna/ Taruni yang berprestasi dibidang akademik (Orang)						
		10.7	Jumlah Taruna/ Taruni yang berprestasi dibidang non akademik Orang)						
		11		Tenaga pendidik kelautan dan perikanan PKP Bone yang tersertifikasi (Orang)	35	35	35	35	35



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama			Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
			11.1	Jumlah Dosen yang memiliki sertifikat pendidik (Orang)					
			11.2	Jumlah rekognisi Dosen Politeknik KP Bone (Orang)					
			11.3	Jumlah Dosen yang memiliki sertifikat kompetensi (Orang)					
4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terstandar	12		Peralatan dan mesin serta sarana teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya di PKP Bone (Unit)		2	2	2	2
		13		Prasarana pendidikan menengah dan tinggi kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya di PKP Bone (Unit)		1	1	1	1
5	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	14		Unit kerja Politeknik KP Bone yang dibangun berpredikat WBK/WBBM (Unit kerja)	1	1	1	1	1
			14.1	Nilai hasil evaluasi pembangunan zona integritas PKP Bone					
		15		Persentase rekomendaisi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PKP Bone (%)	85	85	85	85	85
		16		Penilaian mandiri SAKIP Politeknik KP Bone (Nilai)	81	82	83	84	85
		17		Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Bone (Indeks)	84	85	86	87	88
			17.1	Jumlah ASN yang mempunyai sertifikat (Orang)	77	94	94	94	94
			17.2	Rata-rata Indeks Profesionalitas setiap ASN (Indeks)	90	90	90	90	90
		18		Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Bone (%)	80	80	80	80	80
		19		Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Politeknik KP Bone (%)	80	80	80	80	80
		20		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Bone (Nilai)	92	92	92	92	92
		21		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Bone (Nilai)	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		22 Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik KP Bone (%)	100	100	100	100	100

Politeknik Kelautan dan Perikanan (PKP) Bone menetapkan arah strategis untuk periode 2025–2029 guna memperkuat kontribusinya dalam penyediaan SDM vokasi yang unggul, adaptif, dan berdaya saing tinggi di sektor kelautan dan perikanan. Perumusan indikator kinerja utama (IKU) dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan kelembagaan berjalan terarah, terukur, dan berdampak nyata.

IKU dibagi berdasarkan 5 tujuan strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Mutu Pendidikan Vokasi

- Meningkatkan serapan lulusan ke dunia kerja & kewirausahaan.
- Menjamin kualitas lulusan melalui kelulusan tepat waktu dan sertifikasi kompetensi.
- Memperkuat kemitraan industri dan keberpihakan terhadap anak pelaku utama.

2. Penguatan IPTEK Terapan & Pengabdian Masyarakat

- Mendorong penelitian terapan, publikasi ilmiah, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).
- Mengintegrasikan pengabdian kepada masyarakat dengan proses pembelajaran.

3. Tata Kelola Pendidikan yang Efektif

- Menjaga status akreditasi kelembagaan dan sertifikasi tenaga pendidik.
- Mendorong peningkatan kualifikasi dan jabatan akademik dosen.

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

- Menyediakan dan memperbaharui fasilitas belajar dan praktik sesuai standar vokasi.
- Memperkuat pemanfaatan teknologi informasi pendidikan.

5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel

- Mewujudkan birokrasi berpredikat WBK/WBBM dan meningkatkan nilai SAKIP.
- Meningkatkan profesionalisme ASN serta pelaksanaan manajemen kinerja dan perencanaan strategis.



A.1. Proyeksi Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi institusi, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone menetapkan sejumlah indikator kinerja utama (IKU) sebagai tolok ukur pencapaian strategis selama periode 2025–2029, antara lain:

1. Lulusan bersertifikasi kompetensi: ditargetkan mencapai 100% per tahun, memastikan kesiapan kerja lulusan di industri kelautan dan perikanan.
2. Publikasi nasional: meningkat dari 5 menjadi 7 artikel per tahun, sebagai bentuk kontribusi ilmiah dan inovasi akademik.
3. Perolehan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual): naik dari 3 menjadi 5 per tahun, mencerminkan hasil inovasi dosen dan taruna.
4. Unit kerja berpredikat WBK/WBBM: minimal 1 unit kerja per tahun sebagai bagian dari penguatan tata kelola yang bersih dan melayani.
5. Indeks Profesionalitas ASN: ditingkatkan dari 84 menjadi 88, menandakan peningkatan kualitas SDM dan pelayanan publik.
6. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah): ditargetkan naik dari 81 menjadi 85, mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja.

A.2. Arah Implementasi

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja di atas akan ditopang oleh strategi implementatif yang fokus pada:

1. Tata kelola yang adaptif dan kolaboratif, sehingga mampu menjawab tantangan dinamis sektor pendidikan vokasi kelautan dan perikanan.
2. Penguatan peran unit penunjang mutu dan riset, agar lebih aktif dalam mendorong peningkatan kualitas akademik dan inovasi.
3. Pengembangan SDM dosen dan tenaga kependidikan, melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan penguatan karakter profesional.
4. Optimalisasi kemitraan strategis dengan industri, pemerintah daerah, dan masyarakat, guna memperluas dampak tridharma perguruan tinggi dan meningkatkan relevansi pendidikan vokasi

Indikator Kinerja Utama PKP Bone 2025–2029 merupakan peta jalan institusional yang akan memastikan ketercapaian visi sebagai “*Pusat Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Unggul dan Inovatif*”. Dengan perencanaan yang terukur dan pelaksanaan yang terintegrasi, institusi ini siap menjawab tantangan masa depan.



B. Kerangka Pendanaan

Penyelenggaraan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Kelautan dan Perikanan (PKP) Bone untuk periode 2025–2029 dirancang dalam kerangka pendanaan yang bersumber utama dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM-KP) melalui alokasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Rencana pendanaan ini secara strategis dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian, yang mengusulkan pembiayaan melalui dua sumber utama, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk tahun 2025 hingga 2029.

Alokasi anggaran dari APBN digunakan untuk menjamin keberlangsungan dan mutu pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, terutama dalam mendukung kegiatan inti pendidikan vokasi, riset terapan yang responsif terhadap kebutuhan industri kelautan dan perikanan, serta pengabdian masyarakat berbasis desa inovasi. Sementara itu, pendanaan dari PNBP akan memperkuat kapasitas institusi dalam menjalankan program-program pengembangan kelembagaan, pemeliharaan sarana prasarana, serta inovasi pengajaran dan pelatihan berbasis teknologi.

Seluruh porsi anggaran tersebut akan didistribusikan secara tahunan dan disalurkan melalui Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan sebagai unit teknis pelaksana, guna memastikan bahwa perencanaan anggaran selaras dengan kebutuhan operasional dan arah kebijakan strategis PKP Bone. Pengelolaan dana ini akan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas, serta diarahkan untuk memperkuat kapasitas institusi dalam mencetak lulusan yang unggul, menghasilkan riset yang aplikatif, dan memberdayakan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Dengan demikian, kerangka pendanaan ini menjadi landasan penting dalam mendukung pencapaian visi PKP Bone sebagai institusi pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang profesional, inovatif, dan berdaya saing global.



BAB V PENUTUP

Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan. Hal tersebut untuk mendukung pembangunan Kelautan dan Perikanan yang sedang dilaksanakan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan produksi, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Pembangunan KP akan berjalan dengan lancar jika dilaksanakan oleh tenaga yang professional dan kompeten di bidangnya.

Rencana Strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen yang disusun untuk menjabarkan Rencana Strategis Pusat Pendidikan KP yang secara berjenjang merupakan penjabaran Rencana Strategis Badan Riset dan Sumberdaya Manusia KP dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis ini disusun untuk memetakan dan menjawab berbagai persoalan dan tantangan serta dinamika yang terjadi sepanjang tahun 2020 - 2024. Namun demikian, mengingat dinamisnya perubahan serta adanya tuntutan pengembangan organisasi dan masyarakat, sangat mungkin ada hal-hal yang belum terakomodasi. Untuk mengatasinya, review terhadap Restra sebagai upaya penyempurnaan format kebijakan dan dukungan kegiatan sangat dimungkinkan, agar pelaksanaan Program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone selama Tahun 2024 – 2029 dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

Sangat disadari masih banyak kekurangan dalam rancangan ini, saran dan masukan sangat kami harapkan guna penyempurnaan dokumen Rencana Strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone melalui kegiatan *review* Renstra pada setiap tahunnya, yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan program kegiatan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone 5 (lima) tahun mendatang.